



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**



Laporan Keuangan Unaudited

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සංවර්ධන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කටයුතු
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සමාජ සංවර්ධන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කටයුතු
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කටයුතු (පළාත්) (පළාත්) (පළාත්)
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI BALI

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Audited terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Operasional,
4. Laporan Perubahan Ekuitas dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab kami dan disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Denpasar, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali


I Made Dwi Dewata, S.STP, M.Si.
NIP.197304171996011001

KATA PENGANTAR

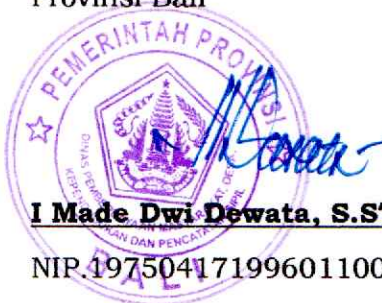
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali



I Made Dwi Dewata, S.STP, M.Si.
NIP.197504171996011001

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	2
1.3 Informasi umum tentang entitas akuntansi.....	3
1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.....	4
BAB II Kerangka Ekonomi Makro.....	7
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah.....	7
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah.....	20
BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.....	21
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	21
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	21
3.3 Prosedur penyusunan informasi kinerja keuangan OPD.....	23
BAB IV Kebijakan akuntansi.....	24
4.1 Entitas pelaporan/akuntansi keuangan daerah.....	24
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	25
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan....	25
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.....	26
BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.....	32
5.1 Laporan realisasi anggaran.....	32
5.2 Neraca.....	62
5.3 Laporan operasional (LO).....	88

5.4	Laporan perubahan ekuitas.....	114
BAB VI	Penutup.....	116

**PEMERINTAH PROVINSI BALI****DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - j. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); dan
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Tugas, Fungsi, dan Struktur DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dukcapil Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya

Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPKAD Provinsi Bali mempunyai fungsi:

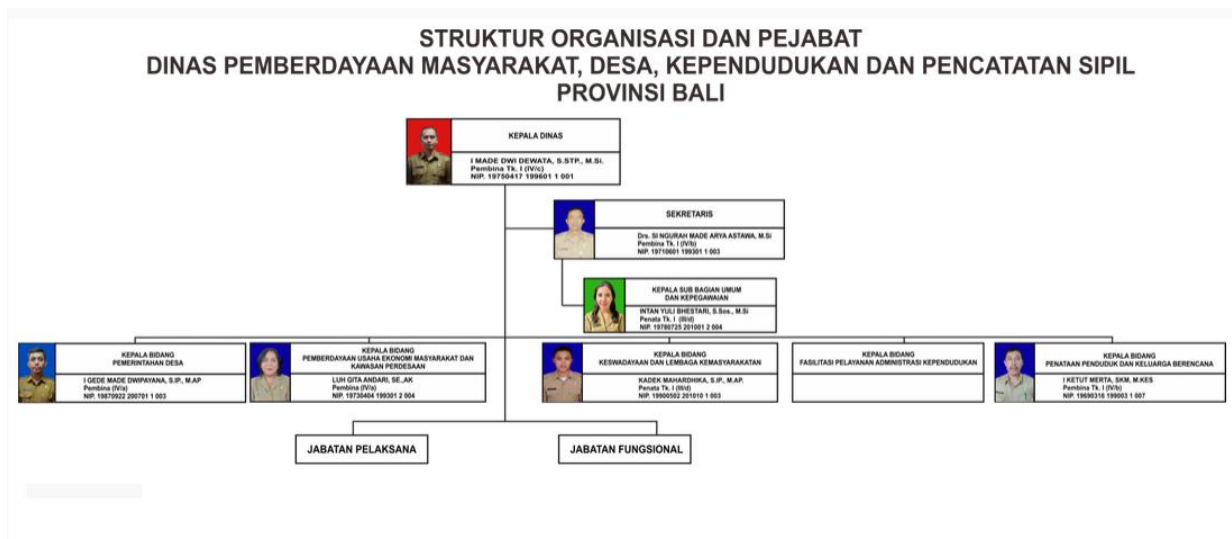
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, dan keluarga berencana
- b. Pemeberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, dan keluarga berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan 1.1.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tugas pokok dan fungsi OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Akutansi
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan / akuntansi keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional (LO)
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan dan pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi. Arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi *Sad Kerthi* pada kehidupan Krama Bali melalui Desa Adat
2. Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
3. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat
4. Memperkuat Kedudukan dan Kelembagaan Subak
5. Meningkatkan Peran Subak dalam Ketahanan Pangan Daerah
6. Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
7. Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan
8. Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat
9. Mempercepat layanan kesehatan tradisional
10. Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal.
11. Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
12. Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.
13. Menyediakan pendidikan berbasis vokasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar
14. Menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru berbasis teknologi dan pedagogi modern.
15. Memastikan semua sekolah memiliki akses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring dan hybrid.
16. Memperkuat Regulasi Daerah untuk Pendidikan berbasis Pesraman
17. Membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis Pesraman secara merata dan proporsional
18. Menyiapkan generasi muda untuk berperan aktif sebagai

pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali

19. Menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda
20. Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
21. Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam ajang nasional dan internasional
22. Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (sport tourism)
23. Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel
24. Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali
25. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali
26. Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali
27. Menuntaskan sistem pertanian organik
28. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian
29. Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah
30. Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna
31. Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan
32. Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan
33. Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah
34. Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi
35. Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah
36. Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru.
37. Memperkuat Penegakan, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi
38. Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali
39. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital
40. Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital
41. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi
42. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri

lokal Bali

43. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali
44. Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional
45. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali
46. Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
47. Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 -2029

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional
	Sasaran 2 : Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali
	Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
	Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali
Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis	Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.	Bali
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali
	Sasaran 3 : Meningkatkan Investasi Daerah
	Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desanya Setiap Kabupaten/Kota di Bali.
	Sasaran 5 : Meningkatkan Peran UMKM dan Koperasi sebagai Penggerak Utama Perekonomian Bali
	Sasaran 6 : Meningkatkan Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional.
	Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepariwisata
Tujuan 4 : Meningkatkan Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali	Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien
Tujuan 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang
	Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan

	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan
	Sasaran 4 : Meningkatkan Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan
Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kehidupan Demokrasi Masyarakat
	Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu
Tujuan 8 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
	Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Reformasi Hukum
	Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi
	Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Bali

Sumber: Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

2.1.1 Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Tahun 2025

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan I Tahun 2025.

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

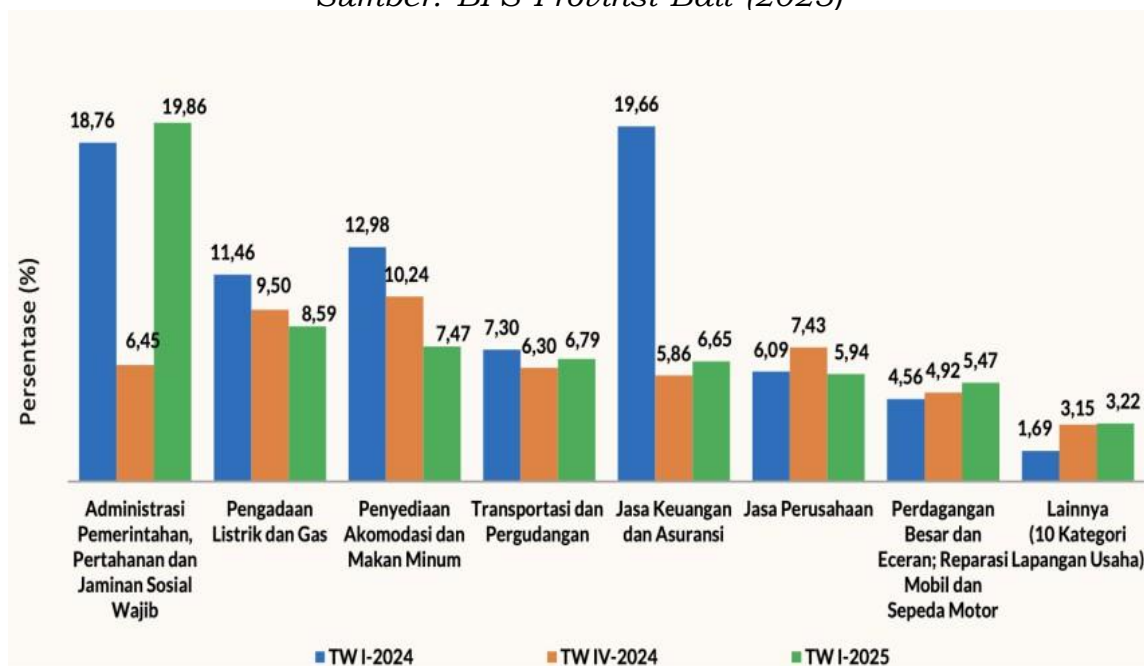
Perekonomian Bali pada triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp75,47 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp41,91 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2025 terkontraksi sedalam 4,38 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (*q-to-q*). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Konstruksi sedalam 8,83 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terkontraksi sedalam 40,90 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,52 persen.

Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 13,47 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,75 persen.

Gambar 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali secara *Year to Year (y to y)* 2024-2025

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)



2. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada wilayah amatan. IHK merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan hargadari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Provinsi Bali pada bulan Februari 2025 secara *year on year* (*y-on- y*), mengalami inflasi sebesar 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,23. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 107,73 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 106,26. Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,18 persen; kelompok transportasi sebesar 1,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,88 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,43 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 13,24 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,38 persen.

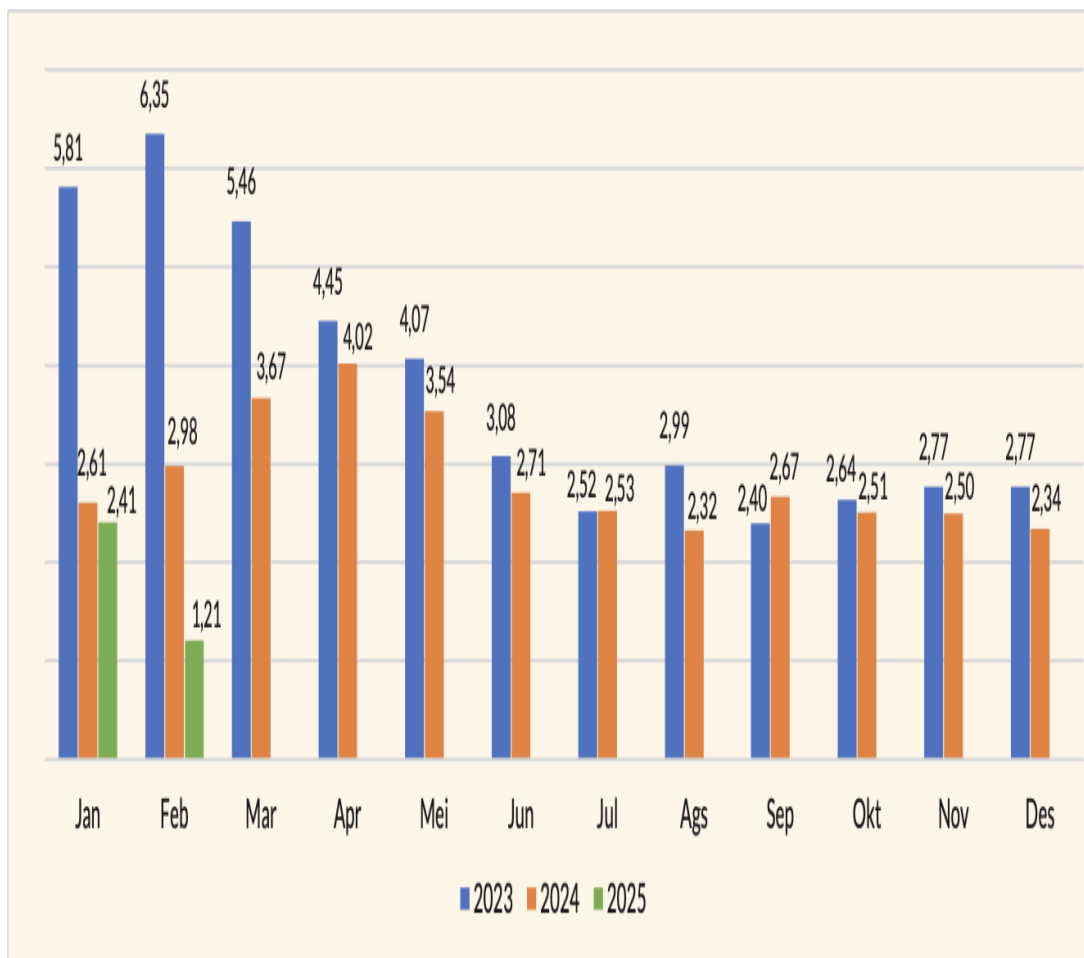
Secara bulanan (*month to month / m-t-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,57 persen. Sementara secara *year to date* (*y- to-d*), tercatat deflasi sebesar 0,59 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan

hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di empat kabupaten/kota tersebut, pada Februari 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 1,21 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,95 pada Februari 2024 menjadi 107,23 pada Februari 2025. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ y-to-d*) Februari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,59 persen, begitu pula secara bulanan (*m-to-m*) tercatat deflasi sebesar 0,57 persen.

Gambar 2.2

Tingkat Inflasi *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Bali Bulan Januari 2023- Februari 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)



3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada Tahun 2024 sebesar 3,80% atau turun 0,45 poin dari Tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode September Tahun 2024 adalah 176,21 ribu jiwa, turun 17,57 ribu jiwa dari Tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin Tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (Tahun 2019).

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	196,92	211,46	205,36	193,78	176,21
2	Persentase (%)	3,78	4,53	4,57	4,25	3,80

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)

4. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 2,74 juta orang, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 77,40%, meningkat 0,03 persen poin dibandingkan periode Februari 2024. Pada Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 2,69 juta orang, meningkat 31,22 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2024. Lapangan usaha Pengangkutan & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran merupakan lapangan usaha dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi, masing-masing tercatat sekitar 7,93 ribu orang, 7,83 ribu orang, dan 5,30 ribu orang.

Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan pada periode Agustus 2024–Februari 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Pekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi pasar kerja Bali pada Februari 2025, dengan persentase mencapai 28,75% (774,46 ribu orang). Dibandingkan Februari 2024, persentase setengah pengangguran meningkat 0,16

persen poin menjadi 2,26%, sementara pekerja paruh waktu tercatat 23,87%, turun 2,98 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 1,58%, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2024 dan turun 0,29 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Februari 2025 tercatat sebanyak 3,54 juta orang, yang sebagian besar termasuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 2,74 juta orang atau setara dengan 77,40% dari total penduduk usia kerja. Sisanya, sebanyak 0,80 juta orang, termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 23,67 ribu orang (0,87%), yang mengindikasikan adanya pertumbuhan partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 2,69 juta orang penduduk yang bekerja dan 43,13 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 31,22 ribu orang (1,17%) dan pengangguran berkurang sebanyak 7,55 ribu orang (- 14,90%) dibandingkan Februari 2024. Jika dibandingkan Agustus 2024, angkatan kerja meningkat 23,06 ribu orang (0,85%) dan jumlah penduduk bekerja naik sebesar 28,60 ribu orang (1,07%). Di sisi lain, jumlah pengangguran turun sebesar 5,55 ribu orang (-11,40%), menandakan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan mencerminkan seberapa besar penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Pada Februari 2025, TPAK Provinsi Bali tercatat sebesar 77,40%, mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berikut adalah berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Bali serta prospek pembangunan ekonomi Bali Tahun 2025.

1. Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di Tahun 2025 adalah:

- a. Ketimpangan antar Wilayah;
- b. Ketergantungan pada Sektor Pariwisata;
- c. *Gap* antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem

Pembayaran; dan

d. Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal.

2. Prospek Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan *Outlook* Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Fondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (*yoy*) pada keseluruhan Tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (*yoy*) pada Desember 2024 dan 2,41% (*yoy*) pada Januari 2025.

Stabilitas sistem keuangan terjaga didukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (*yoy*) atau lebih tinggi dari 6,11% (*yoy*) pada 2023, diiringi dengan *Non-Performing Loan* yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan *merchant* QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan kartu kredit Indonesia oleh pemda di Bali.

2.1.3 Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi risiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Bali
 - a. Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan.
 - b. Pengembangan UMKM Bali yang Tangguh dan Berorientasi Ekspor Guna Mendorong Perekonomian.
 - c. Transformasi Ekonomi Bali (*Bali Kerthi*)
 - d. Keberlanjutan Proyek Konstruksi Menopang Perekonomian Bali
2. Pengendalian Inflasi

Pada bulan Februari 2025 secara *year on year (y-on-y)*, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,23. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 107,73 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 106,26. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah Tahun 2025 untuk mendukung pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;

- b. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; dan
 - c. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.
3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Persentase penduduk miskin di Bali pada Tahun 2024 sebesar 3,80% atau turun 0,45 poin dari Tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode September Tahun 2024 adalah 176,21 ribu jiwa, turun 17,57 ribu jiwa dari Tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (Tahun 2019). Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah Tahun 2025 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

 - a. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan;
 - b. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum;
 - c. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;
 - d. DAK Non Fisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil serta peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah; dan
 - e. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.
4. Penurunan *Stunting*

Data belanja APBD untuk penanganan *stunting* dan data angka prevalensi *stunting* di daerah Tahun 2024 menggambarkan sebagian daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi memiliki belanja penanganan *stunting* masih rendah. Bali termasuk daerah dengan angka *stunting* yang rendah, sehingga berada pada kategori Belanja *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* Kuadran III, yaitu wilayah dengan rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* di bawah angka nasional. Lebih lanjut, dari 33 provinsi di Indonesia yang disurvei, hanya dua provinsi saja yang mencapai target prevalensi *stunting* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni DKI Jakarta dan Bali. Prevalensi *stunting* di Bali pada 2023 mencapai 7,2 persen, sedangkan nasional sebesar 21,5 persen. *Stunting* Bali ditarget turun menjadi 6,15 persen. Strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada Tahun 2025 untuk menurunkan *stunting* kedepannya dapat difokuskan pada:

- a. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan stunting antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
 - b. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
 - c. Intervensi fiskal dari TKD dilakukan melalui beberapa instrumen terkait; dan
 - d. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.
5. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah Strategi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib di daerah adalah sebagai berikut:
- a. Belanja Wajib Pendidikan Sebesar 20 Persen dari Belanja Daerah:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
 - b. Belanja Wajib Kesehatan:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
 - c. Belanja Wajib Infrastruktur:
 - 1) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif;
 - 2) Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur;
 - 3) Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas; dan

- 4) Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- d. Pengendalian Belanja Pegawai:
 - 1) Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN; dan
 - 2) Melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian sehingga dapat menekan *cost* belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan adalah:
 - a) Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*; dan
 - b) Penyesuaian jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika memungkinkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari Tahun ke Tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah.

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2025

Tabel 3.1

Laporan Realisasi Keuangan TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	26.263.941.863,00	24.272.768.258,00	92,42	20.250.233.991,00
BELANJA OPERASI	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00
BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00
JUMLAH BELANJA	26.263.941.863,00	24.272.768.258,00	92,42	20.250.233.991,00
SURPLUS/DEFISIT	(26.263.941.863,00)	(24.272.768.258,00)	92,42	(20.250.233.991,00)

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali telah menyerap anggaran sebesar 92,42% pada tahun 2025 atau sebesar Rp. 24.272.768.258 yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, dimana ini menunjukkan bahwa kinerja yang di capai termasuk kategori cukup efektif dalam pelaksanaan program kerja. Total belanja daerah pada tahun 2025 ini meningkat sebesar kurang lebih Rp4 miliar dibandingkan dengan total belanja pada tahun 2024.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pelaksanaan kegiatan di DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali yang penyerapan anggaran kegiatannya di bawah 75% dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan di DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali di bawah 75%

NO	Uraian Kegiatan	Anggaran	Setelah Pergeseran	Realisasi	%
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	155,241,720	122,686,310	85,783,670	69.92
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,715,000	15,715,000	9,813,407	62.45
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174,800,000	174,800,000	117,551,650	67.25
4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16,280,700	16,280,700	768,000	4.72

Adapun penjelasan atas realisasi pada masing-masing sub kegiatan yang tidak mencapai penyerapan atau realisasi sebesar 75% adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, tingkat realisasi anggaran berada di bawah 75% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor seperti, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat disebabkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya dari sisi harga satuan belanja yang lebih rendah dibandingkan perencanaan awal.
- Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa pelaksanaan dilakukan secara selektif, hanya apabila terdapat undangan resmi dari Kementerian atau Lembaga di tingkat pusat. Keputusan untuk melakukan perjalanan dinas sangat bergantung pada disposisi pimpinan, sehingga beberapa undangan tidak dihadiri apabila dianggap tidak krusial atau dapat diwakilkan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, yang secara kumulatif turut menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada sub kegiatan dimaksud.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tingkat realisasi anggaran berada di bawah 75% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya dari sisi harga satuan belanja yang lebih rendah dibandingkan perencanaan awal seperti

pada Belanjai Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Cetak, dimana belanja yang direalisasikan menggunakan harga rekanan yang lebih rendah dari perencanaan awal, sehingga berdampak pada tidak optimalnya penyerapan anggaran

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tingkat realisasi anggaran berada di bawah 75% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti Penghematan & Efisiensi Internal yaitu adanya upaya akan kesadaran untuk mengurangi penggunaan seperti, penggunaan listrik seperlunya, mematikan lampu, dan pemakaian air

4. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- Pada Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, tingkat realisasi anggaran berada di bawah 75% dari pagu yang ditetapkan. Pada belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, dan Belanja Makan dan Minum Rapat disebabkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya dari sisi harga satuan belanja yang lebih rendah dibandingkan perencanaan awal.
- Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa pelaksanaan dilakukan secara selektif, hanya apabila terdapat undangan resmi dari Kementerian atau Lembaga di tingkat pusat. Keputusan untuk melakukan perjalanan dinas sangat bergantung pada disposisi pimpinan, sehingga beberapa undangan tidak dihadiri apabila dianggap tidak krusial atau dapat diwakilkan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, yang secara kumulatif turut menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada sub kegiatan dimaksud.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada OPD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali).

Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda. Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN/AKUTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 entitas akuntansi yang meliputi 29 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan perangkat daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan

4.2 BASIS AKUTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akruaI mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akruaI tercermin pada Pendapatan-Laporan Operasional (LO) dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

4. Piutang

Piutang disajikan sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Relizable Value), yang merupakan selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu

sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu 1 tahun.

6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

7. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

8. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan

nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan

jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2018 belum diberlakukan dan Pemerintah Provinsi Bali mulai memberlakukan depresiasi/penyusutan aktiva tetap pada tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

2. Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi dengan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca PPKD pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi dengan perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca PPKD pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke

dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset tetap dan aset lainnya. Pos ini terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)****5.1.1 BELANJA DAERAH**

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00
BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00
Jumlah	26.263.941.863,00	24.272.768.258,00	92,42	20.250.233.991,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp4.022.534.267,00 atau 19,86%.

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	11.544.283.540,00	10.651.346.987,00	92,27	9.170.455.188,00
Belanja Barang dan Jasa	9.807.394.723,00	9.112.035.261,00	92,91	8.880.141.803,00
Belanja Hibah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
Jumlah	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp4.652.385.257,00 atau 23,79%.

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.772.784.424,00	5.477.031.693,00	94,88	3.716.752.267,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.771.499.116,00	5.174.315.294,00	89,65	5.392.502.921,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00
Jumlah	11.544.283.540,00	10.651.346.987,00	92,27	9.170.455.188,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.480.891.799,00 atau 16,15%.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	3.688.775.391,00	3.617.660.831,00	98,07	2.668.200.552,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	356.980.185,00	349.130.574,00	97,80	261.215.558,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	188.612.499,00	184.131.429,00	97,62	164.110.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.340.000,00	117.425.000,00	99,23	73.745.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	198.267.855,00	194.411.490,00	98,05	133.325.220,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	706.028.627,00	578.908.598,00	82,00	40.615.874,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.811,00	53.417,00	78,77	34.730,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	333.800.873,00	274.134.989,00	82,13	231.322.776,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.060.411,00	7.761.412,00	85,66	5.473.115,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.181.143,00	23.283.953,00	85,66	16.419.442,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.499.629,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.772.784.424,00	5.477.031.693,00	94,88	3.716.752.267,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.760.279.426,00 atau 47,36%.

5.1.1.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji Pokok ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	2.536.945.522,00	2.484.576.899,00	97,94	2.640.402.552,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.151.829.869,00	1.133.083.932,00	98,37	27.798.000,00
Jumlah	3.688.775.391,00	3.617.660.831,00	98,07	2.668.200.552,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji Pokok ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp949.460.279,00 atau 35,58%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji Pokok ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis realisasi terhadap anggaran TA 2025

Secara keseluruhan, capaian realisasi belanja gaji pokok mencapai 98,07%. Angka ini dikategorikan sangat tinggi dan efektif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akurasi Perencanaan: Penyerapan yang mendekati 100% (97,94% untuk PNS dan 98,37% untuk PPPK) menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran di awal tahun sudah sangat presisi, dengan memperhitungkan jumlah pegawai aktif dan estimasi kenaikan berkala secara akurat.
 - Pengendalian Administrasi: Rendahnya selisih (sis) anggaran sebesar 1,93% mengindikasikan tertibnya administrasi pembayaran gaji. Sisa tersebut biasanya merupakan angka efisiensi yang wajar, yang muncul akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun di tengah tahun atau adanya sela waktu (gap) dalam proses penggajian pegawai baru.
2. Perbandingan Realisasi TA 2025 terhadap Realisasi TA 2024
- Terdapat perbedaan tren yang kontras antara Gaji PNS dan Gaji PPPK yang mempengaruhi total belanja:
- a. Penurunan pada Belanja Gaji Pokok PNS, Realisasi gaji PNS tahun 2025 (Rp2,48 Miliar) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 (Rp2,64 Miliar).
 - Penyebab: Hal ini umumnya disebabkan oleh jumlah pegawai yang pensiun (alamiah) yang lebih besar daripada jumlah penerimaan CPNS baru di instansi tersebut.
 - Dampak: Terjadi efisiensi pada pos belanja PNS sebesar kurang lebih Rp155,8 Juta.
 - b. Kenaikan Signifikan pada Belanja Gaji Pokok PPPK
 Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada kategori PPPK, dari hanya Rp27,7 Juta di 2024 menjadi Rp1,13 Miliar di 2025.
 - Penyebab: Kenaikan fantastis ini disebabkan oleh adanya pengangkatan besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mulai menerima gaji penuh di tahun 2025.
 - Dampak: Pos PPPK menjadi penyumbang utama peningkatan total belanja gaji secara keseluruhan.

5.1.1.1.1.2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Keluarga ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	246.002.038,00	240.958.482,00	97,95	259.225.310,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	110.978.147,00	108.172.092,00	97,47	1.990.248,00
Jumlah	356.980.185,00	349.130.574,00	97,80	261.215.558,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp87.915.016,00 atau 33,66%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis realisasi terhadap anggaran TA 2025

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN secara akumulatif mencapai Rp349.130.574,00 atau sebesar 97,80% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp356.980.185,00.

- Tunjangan Keluarga PNS: Mencapai realisasi 97,95%. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang sangat akurat. Selisih sebesar 2,05% (kurang bayar dari pagu) disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) di tengah tahun berjalan serta adanya anak pegawai yang sudah tidak masuk dalam tanggungan (berusia di atas 21/25 tahun atau sudah menikah/bekerja).
- Tunjangan Keluarga PPPK: Mencapai realisasi 97,47%. Capaian yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar formasi PPPK telah melengkapi administrasi data keluarga sehingga hak tunjangan dapat dibayarkan mendekati pagu yang tersedia.

2. Analisis Perbandingan terhadap Realisasi TA 2024

Total realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp87.915.016,00 atau naik sekitar 33,66% dibandingkan realisasi tahun 2024 (Rp261.215.558,00). Berikut adalah rincian penyebabnya:

- Peningkatan Drastis pada PPPK: Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok PPPK, di mana realisasi melonjak dari hanya Rp1.990.248,00 (2024) menjadi Rp108.172.092,00 (2025).
- Penurunan pada PNS: Berbanding terbalik dengan PPPK, realisasi tunjangan keluarga PNS justru mengalami penurunan dari Rp259.225.310,00 (2024) menjadi Rp240.958.482,00 (2025).

5.1.1.1.1.3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Jabatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00
Jumlah	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.840.000,00 atau 6,41%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Realisasi terhadap Anggaran TA 2025

Berdasarkan data pada tabel, realisasi Belanja Tunjangan Jabatan PNS TA 2025 mencapai Rp130.130.000,00 atau sebesar 96,27% dari pagu anggaran sebesar Rp135.170.000,00.

- Penyebab Capaian Tinggi (96,27%): Capaian ini menunjukkan penyerapan yang sangat baik dan mendekati target. Hal ini didorong oleh ketepatan data jumlah pejabat struktural maupun fungsional yang aktif menduduki jabatan di instansi, sehingga pembayaran tunjangan jabatan berjalan secara rutin dan stabil.
- Penyebab Sisa Anggaran (3,73%): Adanya selisih kurang sebesar 3,73% (Rp5.040.000,00) dari pagu anggaran disebabkan oleh beberapa faktor teknis, antara lain, Masa Transisi Jabatan yaitu Adanya jeda waktu antara pejabat yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dengan pelantikan pejabat baru (kekosongan jabatan sementara).

2. Analisis Perbandingan terhadap Realisasi TA 2024

Terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp7.840.000,00 atau meningkat sekitar 6,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang berjumlah Rp122.290.000,00.

- Faktor Pendorong Kenaikan:
 - (a) Pengangkatan Pejabat Baru: Adanya pelantikan pejabat fungsional atau struktural baru di tahun 2025 untuk mengisi formasi yang sebelumnya kosong atau hasil dari kenaikan jenjang jabatan (promosi).
 - (b) Penyetaraan Jabatan: Implementasi kebijakan penyetaraan jabatan yang mengakibatkan lebih banyak pegawai berhak menerima tunjangan jabatan fungsional dibandingkan tahun sebelumnya.
 - (c) Jumlah Personil Aktif: Jumlah pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan pada tahun 2025 secara rata-rata lebih banyak dibandingkan tahun 2024.

5.1.1.1.1.4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	170.660.000,00	166.178.930,00	97,37	160.240.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.952.499,00	17.952.499,00	100,00	3.870.000,00
Jumlah	188.612.499,00	184.131.429,00	97,62	164.110.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp20.021.429,00 atau 12,20%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tunjangan Fungsional PNS

- Capaian terhadap Anggaran 2025: Realisasi mencapai 97,37% (Rp166.178.930,00). Capaian ini dikategorikan sangat tinggi namun tidak mencapai 100%. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya sisa anggaran dari pegawai yang memasuki masa pensiun (BUP), mutasi keluar, atau adanya jeda waktu dalam pemutakhiran data jabatan fungsional.
- Perbandingan dengan TA 2024: Terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp5.938.930,00 dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh adanya pengangkatan pejabat fungsional baru atau kenaikan jenjang jabatan fungsional pada formasi PNS yang ada.

2. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK

- Capaian terhadap Anggaran 2025: Realisasi mencapai 100% (Rp17.952.499,00). Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang sangat presisi dan penyerapan yang optimal sesuai dengan jumlah formasi PPPK yang aktif.
- Perbandingan dengan TA 2024: Terjadi lonjakan realisasi yang sangat signifikan dibandingkan TA 2024 yang hanya sebesar Rp3.870.000,00. Kenaikan drastis ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah personel PPPK secara signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.130.000,00	58.215.000,00	98,45	73.745.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	59.210.000,00	59.210.000,00	100,00	0,00
Jumlah	118.340.000,00	117.425.000,00	99,23	73.745.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp43.680.000,00 atau 59,23%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

- Capaian terhadap Anggaran 2025: Realisasi mencapai 98,45% (Rp58.215.000,00). Terdapat sisa anggaran (silpa) sebesar 1,55% atau Rp915.000,00. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika pegawai seperti adanya PNS yang beralih dari tunjangan umum ke tunjangan fungsional tertentu (karena pelantikan jabatan fungsional) atau adanya pegawai yang memasuki masa pensiun di tengah tahun berjalan.
- Perbandingan dengan TA 2024: Terjadi penurunan realisasi sebesar Rp15.530.000,00 dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh proses transformasi jabatan, di mana banyak PNS yang sebelumnya menerima tunjangan umum kini telah beralih menjadi Pejabat Fungsional (yang memiliki kategori tunjangan berbeda), sehingga beban pada pos Tunjangan Umum PNS berkurang.

2. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

- Capaian terhadap Anggaran 2025: Realisasi mencapai 100,00% (Rp59.210.000,00). Capaian ini menunjukkan ketepatan perencanaan yang sempurna antara alokasi anggaran dengan jumlah personel PPPK yang ada di lapangan.
- Perbandingan dengan TA 2024: Terjadi kenaikan yang sangat kontras dari Rp0,00 pada tahun 2024 menjadi Rp59.210.000,00 pada tahun 2025. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat pengangkatan atau penempatan personel PPPK baru secara masif yang sebelumnya tidak ada atau belum dianggarkan pada pos tunjangan umum di tahun 2024.

5.1.1.1.1.6 Belanja Tunjangan Beras ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Beras ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras PNS	126.372.900,00	124.345.140,00	98,40	132.021.660,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	71.894.955,00	70.066.350,00	97,46	1.303.560,00
Jumlah	198.267.855,00	194.411.490,00	98,05	133.325.220,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp61.086.270,00 atau 45,82%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN pada TA 2025 mencapai Rp194.411.490,00 atau sebesar 98,05% dari total anggaran yang ditetapkan senilai Rp198.267.855,00.

2. Terdapat dinamika yang signifikan jika membandingkan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya:

Kategori	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Tunjangan Beras PNS	132.021.660,00	124.345.140,00	(- 5,81%)
Tunjangan Beras PPPK	1.303.560,00	70.066.350,00	(+ 5.275%)
Total	133.325.220,00	194.411.490,00	(+ 45,82%)

- Penurunan pada PNS: Terjadi penurunan realisasi sebesar Rp7.676.520,00 dibandingkan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan berkurangnya jumlah personel PNS, kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya pegawai yang pensiun yang tidak sepenuhnya digantikan oleh formasi PNS baru pada tahun tersebut.
- Lonjakan Drastis pada PPPK: Terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar Rp68.762.790,00. Hal ini menunjukkan adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran di tahun 2025, atau hasil dari pengangkatan formasi tahun sebelumnya yang baru mulai menerima tunjangan secara penuh di tahun 2025.
- Kenaikan Total Beban Belanja: Secara agregat, beban belanja tunjangan beras meningkat sebesar 45,82%. Pergeseran struktur pegawai dari PNS ke PPPK menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan total anggaran dan realisasi di tahun 2025.

5.1.1.1.1.7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	667.816.637,00	574.524.854,00	86,03	40.615.874,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	38.211.990,00	4.383.744,00	11,47	0,00
Jumlah	706.028.627,00	578.908.598,00	82,00	40.615.874,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp538.292.724,00 atau 1.325,33%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada TA 2025 tercatat sebesar Rp578.908.598,00 atau 82,00% dari pagu anggaran sebesar Rp706.028.627,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang hanya

sebesar Rp40.615.874,00, terdapat kenaikan volume belanja yang sangat signifikan

5.1.1.1.1.8 Belanja Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.992,00	32.056,00	69,70	34.235,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.819,00	21.361,00	97,90	495,00
Jumlah	67.811,00	53.417,00	78,77	34.730,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pembulatan Gaji ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp18.687,00 atau 53,81%.

- Belanja Pembulatan Gaji PNS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 69,70% pada TA 2025
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.866,00 pada TA 2025

5.1.1.1.1.9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	272.509.305,00	216.951.046,00	79,61	229.976.448,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	61.291.568,00	57.183.943,00	93,30	1.346.328,00
Jumlah	333.800.873,00	274.134.989,00	82,13	231.322.776,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp42.812.213,00 atau 18,51%.

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,61% pada TA 2025
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp55.837.615,00 pada TA 2025

5.1.1.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.911.904,00	5.084.510,00	86,00	5.406.398,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.148.507,00	2.676.902,00	85,02	66.717,00
Jumlah	9.060.411,00	7.761.412,00	85,66	5.473.115,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.288.297,00 atau 41,81%.

- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.610.185,00 pada TA 2025

5.1.1.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.735.733,00	15.253.592,00	86,00	16.219.297,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.445.410,00	8.030.361,00	85,02	200.145,00
Jumlah	27.181.143,00	23.283.953,00	85,66	16.419.442,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.864.511,00 atau 41,81%.

- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.830.216,00 pada TA 2025

5.1.1.1.1.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.786.383,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.713.246,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.499.629,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.551.498.918,00	3.180.770.864,00	89,56	3.367.689.632,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.656.226.627,00	1.486.772.480,00	89,77	1.484.338.413,00
Jumlah	5.771.499.116,00	5.174.315.294,00	89,65	5.392.502.921,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp218.187.627,00) atau (4,05%).

5.1.1.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.435.025.656,00	3.075.957.982,00	89,55	3.367.689.632,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.473.262,00	104.812.882,00	89,99	0,00
Jumlah	3.551.498.918,00	3.180.770.864,00	89,56	3.367.689.632,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp186.918.768,00) atau (5,55%).

1. Beban Kerja PNS (89,55%): Terealisasi sebesar Rp3.075.957.982,00. Selisih sebesar 10,45% dari anggaran kemungkinan besar dipengaruhi oleh mekanisme pemotongan TPP akibat ketidakhadiran (absensi), hukuman disiplin, atau adanya jabatan yang kosong karena pensiun/mutasi yang tidak terisi sepanjang tahun.
2. Beban Kerja PPPK (89,99%): Terealisasi sebesar Rp104.812.882,00. Capaian ini hampir menyentuh 90%, mengindikasikan bahwa pembayaran TPP bagi PPPK sudah berjalan stabil sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun berjalan.

5.1.1.1.1.2.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00
Jumlah	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp33.702.926,00) atau (6,24%).

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Kondisi Kerja pada TA 2025 tercatat sebesar Rp506.771.950,00 atau 89,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp563.773.571,00. Capaian ini menunjukkan penyerapan yang cukup tinggi dan konsisten, meskipun terdapat sisa anggaran sebesar 10,11% yang tidak terealisasi.
2. Capaian sebesar 89,89% pada kategori PNS menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Beberapa faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai 100% antara lain:
 - Variabel Kehadiran dan Kedisiplinan: Tunjangan kondisi kerja umumnya dibayarkan berdasarkan kehadiran efektif. Adanya pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, atau adanya pemotongan akibat ketidakhadiran/pelanggaran disiplin menyebabkan realisasi lebih rendah dari plafon anggaran.
 - Perubahan Struktur Pegawai: Adanya pegawai di lingkungan kerja dengan kondisi tertentu (berisiko/beban tinggi) yang memasuki masa pensiun atau mutasi keluar di tengah tahun anggaran, sehingga alokasi tunjangan untuk sisa bulan tersebut tidak terserap.

5.1.1.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.606.821.221,00	1.442.313.168,00	89,76	1.484.338.413,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	49.405.406,00	44.459.312,00	89,99	0,00

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
PPPK				
Jumlah	1.656.226.627,00	1.486.772.480,00	89,77	1.484.338.413,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.434.067,00 atau 0,16%.

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada TA 2025 mencapai Rp1.486.772.480,00 atau sebesar 89,77% dari total anggaran Rp1.656.226.627,00. Secara umum, capaian ini berada dalam kategori Tinggi, yang mencerminkan serapan anggaran yang stabil dan terukur pada komponen prestasi kerja.
2. Tingkat penyerapan pada kedua kategori pegawai menunjukkan angka yang sangat konsisten:
 - Prestasi Kerja PNS (89,76%): Terealisasi sebesar Rp1.442.313.168,00. Selisih sekitar 10,24% dari pagu anggaran disebabkan oleh variabel penilaian kinerja individu. Karena TPP Prestasi Kerja dibayarkan berdasarkan capaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan produktivitas kerja, adanya pegawai yang tidak mencapai target kinerja penuh atau adanya kekosongan jabatan akibat pensiun/mutasi menjadi penyebab utama sisa anggaran.
 - Prestasi Kerja PPPK (89,99%): Terealisasi sebesar Rp44.459.312,00. Penyerapan ini hampir menyentuh angka 90%, menunjukkan bahwa sistem penilaian prestasi kerja bagi PPPK sudah terimplementasi dengan sangat baik dan sesuai dengan perencanaan anggaran tahun berjalan.
3. Perbandingan Realisasi TA 2025 vs Realisasi TA 2024
Terdapat dinamika yang menarik saat membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya:

Kategori	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Prestasi Kerja PNS	1.484.338.413,00	1.442.313.168,00	(- 2,83%)
Prestasi Kerja PPPK	0,00	44.459.312,00	Baru
Total	1.484.338.413,00	1.486.772.480,00	(+ 0,16%)

- Kontraksi pada PNS: Terjadi penurunan realisasi pada kategori PNS sebesar 2,83%. Hal ini memperkuat indikasi adanya pengurangan jumlah pegawai PNS secara bertahap (pensiun alami) yang berdampak pada berkurangnya beban belanja TPP Prestasi Kerja untuk kategori tersebut.
- Ekspansi pada PPPK: Komponen PPPK yang sebelumnya Nol (Rp0,00) pada TA 2024, kini menyerap anggaran sebesar Rp44,4 juta. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemberian penghargaan prestasi

kerja bagi PPPK yang baru diimplementasikan secara efektif pada tahun 2025.

- Keseimbangan Anggaran: Meskipun ada penurunan pada realisasi PNS, total realisasi secara keseluruhan meningkat tipis sebesar 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan belanja untuk PPPK mampu menyeimbangkan (offset) penurunan belanja pada kategori PNS, sehingga total belanja tetap stabil di angka Rp1,48 miliar.

5.1.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp61.200.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.1.1.3.1 Belanja Honorarium

Berikut ini adalah Belanja Honorarium yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Honorarium TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp50.400.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.1.1.3.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini adalah Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp10.800.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00
Belanja Jasa	3.147.225.773,00	2.960.181.666,00	94,06	3.441.472.431,00
Belanja Pemeliharaan	273.010.000,00	267.512.000,00	97,99	512.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
Jumlah	9.807.394.723,00	9.112.035.261,00	92,91	8.880.141.803,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp231.893.458,00 atau 2,61%.

5.1.1.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00
Jumlah	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.772.323.234,00 atau 82,70%.

5.1.1.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Berikut ini adalah Belanja Barang Pakai Habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	552.585.000,00	552.541.400,00	99,99	688.050.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.146.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.662.600,00	75.953.200,00	81,09	114.480.290,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.744.600,00	43.944.016,00	74,81	30.064.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.750.000,00	131.587.344,00	82,37	5.728.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.742.300,00	9.390.000,00	63,69	9.420.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	894.900,00	165.000,00	18,44	54.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.180.000,00	27.372.600,00	90,70	25.492.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.992.400,00	5.311.350,00	88,63	6.539.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	54.973.100,00	46.288.015,00	84,20	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	188.648.050,00	177.912.320,00	94,31	242.944.500,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.758.600.000,00	1.615.582.755,00	91,87	443.177.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	304.650.000,00	280.022.500,00	91,92	235.490.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.510.000,00	3.393.000,00	96,67	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.855.000,00	897.880.000,00	99,67	245.800.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.100.000,00	48.099.974,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	15.062.500,00
Jumlah	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.772.323.234,00 atau 82,70%.

1. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis pada TA 2025 mencapai Rp3.915.443.474,00 atau sebesar 93,76% dari total anggaran Rp4.175.887.950,00. Capaian ini menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik, dengan peningkatan volume belanja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Secara agregat, terjadi lonjakan realisasi belanja sebesar Rp1.772.323.234,00 atau naik sekitar 82,70% dibandingkan TA 2024

5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	2.401.668.733,00	2.262.291.666,00	94,20	3.102.383.069,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	117.317.940,00	116.541.000,00	99,34	193.079.362,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	533.239.100,00	494.849.000,00	92,80	109.360.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	86.500.000,00	91,05	36.650.000,00
Jumlah	3.147.225.773,00	2.960.181.666,00	94,06	3.441.472.431,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp481.290.765,00) atau (13,99%).

Total realisasi Belanja Jasa pada TA 2025 mencapai Rp2.960.181.666,00 atau sebesar 94,06% dari total pagu anggaran Rp3.147.225.773,00. Capaian ini menunjukkan performa penyerapan yang sangat tinggi dan stabil.

5.1.1.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Berikut ini adalah Belanja Jasa Kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.500.000,00	114.350.000,00	88,99	233.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	307.500.000,00	281.250.000,00	91,46	227.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	44.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	830.102.421,00	830.102.421,00	100,00	1.747.830.544,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	33.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	147.834.928,00	147.834.928,00	100,00	139.056.256,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196,00	110.876.196,00	100,00	104.292.192,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	332.628.588,00	323.638.905,00	97,30	312.876.576,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	105.000.000,00	103.174.500,00	98,26	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	69.700.000,00	69.564.000,00	99,80	0,00
Belanja Tagihan Telepon	30.000.000,00	9.404.520,00	31,35	24.279.968,00
Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	2.333.950,00	48,62	4.528.200,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tagihan Listrik	140.000.000,00	105.813.180,00	75,58	131.924.757,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.626.600,00	3.902.500,00	84,35	6.869.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	49.500.000,00	28.241.266,00	57,05	29.832.376,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.000.000,00	9.655.300,00	53,64	10.293.200,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.400.000,00	49.950.000,00	99,11	0,00
Jumlah	2.401.668.733,00	2.262.291.666,00	94,20	3.102.383.069,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Kantor TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp840.091.403,00) atau (27,08%).

Realisasi Belanja Jasa Kantor pada TA 2025 mencapai Rp2.262.291.666,00 atau sebesar 94,20% dari pagu anggaran Rp2.401.668.733,00. Secara keseluruhan, kinerja penyerapan dikategorikan Sangat Tinggi

5.1.1.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.762.025,00	59.366.250,00	99,34	98.355.162,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.257.976,00	3.236.400,00	99,34	5.361.882,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.072.470,00	4.045.500,00	99,34	6.702.154,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	50.225.469,00	49.892.850,00	99,34	82.660.164,00
Jumlah	117.317.940,00	116.541.000,00	99,34	193.079.362,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp76.538.362,00) atau (39,64%).

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non-ASN pada TA 2025 tercatat sebesar Rp116.541.000,00 atau mencapai 99,34% dari pagu anggaran sebesar Rp117.317.940,00. Capaian ini dikategorikan Sangat Tinggi dan Sangat Akurat, menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran jaminan sosial terserap secara maksimal.

5.1.1.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
--------	------------	------------

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.749.100,00	12.128.000,00	64,69	33.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	339.990.000,00	313.071.000,00	92,08	22.160.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	146.500.000,00	142.250.000,00	97,10	50.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	28.000.000,00	27.400.000,00	97,86	0,00
Jumlah	533.239.100,00	494.849.000,00	92,80	109.360.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp385.489.000,00 atau 352,50%.

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada TA 2025 mencapai Rp494.849.000,00 atau sebesar 92,80% dari pagu anggaran Rp533.239.100,00. Capaian ini dikategorikan Sangat Tinggi, menunjukkan bahwa rencana pemenuhan sarana kerja melalui mekanisme sewa telah berjalan efektif hampir di seluruh lini.

5.1.1.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	18.800.000,00
Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
Belanja Sewa Hotel	93.500.000,00	85.000.000,00	90,91	0,00
Jumlah	95.000.000,00	86.500.000,00	91,05	36.650.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp49.850.000,00 atau 136,02%.

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada TA 2025 tercatat sebesar Rp86.500.000,00 atau 91,05% dari pagu anggaran sebesar Rp95.000.000,00. Capaian ini dikategorikan Tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang memerlukan ruang pihak ketiga telah terlaksana dengan baik sesuai rencana.

5.1.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257.010.000,00	251.928.000,00	98,02	318.623.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	191.525.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.000.000,00	15.584.000,00	97,40	2.850.000,00
Jumlah	273.010.000,00	267.512.000,00	97,99	512.998.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp245.486.000,00) atau (47,85%).

5.1.1.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	162.000.000,00	161.681.000,00	99,80	232.833.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.200.000,00	11.072.000,00	98,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.470.000,00	15.180.000,00	92,17	18.190.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	9.845.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.260.000,00	43.030.000,00	95,07	26.120.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	22.035.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.080.000,00	20.965.000,00	94,95	0,00
Jumlah	257.010.000,00	251.928.000,00	98,02	318.623.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp66.695.000,00) atau (20,93%).

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada TA 2025 tercatat sebesar Rp251.928.000,00 atau mencapai 98,02% dari pagu anggaran Rp257.010.000,00. Capaian ini dikategorikan Sangat Tinggi, menunjukkan

efektivitas manajemen perawatan aset dalam mendukung kelancaran operasional dinas.

5.1.1.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	191.525.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	191.525.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp191.525.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00	2.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	4.866.000,00	97,32	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.000.000,00	7.838.000,00	97,98	0,00
Jumlah	16.000.000,00	15.584.000,00	97,40	2.850.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp12.734.000,00 atau 446,81%.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 mencapai Rp15.584.000,00 atau sebesar 97,40% dari pagu anggaran Rp16.000.000,00. Capaian ini dikategorikan Sangat Tinggi, menunjukkan bahwa seluruh agenda perbaikan infrastruktur utilitas kantor telah terlaksana dengan hampir sempurna.

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00
Jumlah	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.226.653.011,00) atau (51,10%).

5.1.1.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.302.071.000,00	1.092.998.121,00	83,94	2.246.261.132,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.000.000,00	29.700.000,00	90,00	154.290.000,00
Jumlah	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.226.653.011,00) atau (51,10%).

- Secara keseluruhan, total realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada TA 2025 mencapai Rp1.173.898.121,00 atau sebesar 84,68% dari total anggaran
- Rendahnya capaian realisasi TA 2025 jika dibandingkan dengan TA 2024 mencerminkan upaya efisiensi anggaran yang sangat besar (lebih dari 50%). Sementara itu, capaian 84,68% terhadap anggaran 2025 sendiri menunjukkan serapan yang cukup baik namun tetap menyisakan ruang efisiensi, terutama pada pos perjalanan dinas biasa.

5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
Jumlah	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp413.000.000,00 atau 108,12%.

- Secara keseluruhan, total realisasi pada pos belanja ini mencapai Rp795.000.000,00 atau sebesar 96,36% dari pagu anggaran yang ditetapkan
- Capaian realisasi TA 2025 sebesar 96,36% dikategorikan Sangat Tinggi. Meskipun terjadi lonjakan anggaran dan realisasi yang drastis (naik 108%) dibandingkan TA 2024, satuan kerja mampu mengeksekusi anggaran tersebut dengan sangat baik dan tepat sasaran, sehingga serapan anggaran mendekati angka sempurna (100%)

5.1.1.1.2.5.1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
Jumlah	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp413.000.000,00 atau 108,12%.

- Realisasi pada pos Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada TA 2025 mencatat angka Rp795.000.000,00 atau 96,36% dari total anggaran.
- Capaian realisasi Belanja Hadiah pada TA 2025 dikategorikan Sangat Tinggi dan Efektif. Meskipun anggaran ditingkatkan secara drastis dibandingkan tahun lalu, instansi berhasil mengeksekusi penyerapan hingga mendekati 100%, yang mencerminkan tingginya antusiasme serta partisipasi pihak ketiga/masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan.

5.1.1.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
Jumlah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

- Realisasi Belanja Hibah pada TA 2025 tercatat sebesar Rp4.446.000.000,00 atau mencapai 91,75% dari total anggaran yang disediakan
- Capaian realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar 91,75% dikategorikan Tinggi dan Optimal. Meskipun beban anggaran hibah meningkat sangat tajam dibandingkan TA 2024, proses penyaluran tetap berjalan efektif dengan tingkat penyerapan yang mendekati target, mencerminkan tata kelola administrasi hibah yang semakin baik.

5.1.1.1.3.1 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
Jumlah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

- Realisasi Belanja Hibah pada TA 2025 tercatat sebesar Rp4.446.000.000,00 atau mencapai 91,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp4.846.000.000,00.
- Capaian realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar 91,75% dikategorikan Sangat Baik. Meskipun terdapat peningkatan volume anggaran yang hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya

5.1.1.1.3.1.1 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
Jumlah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

- Realisasi Belanja Hibah Uang pada TA 2025 mencapai Rp4.446.000.000,00 atau sebesar 91,75% dari total anggaran yang tersedia
- Secara umum, realisasi Belanja Hibah TA 2025 dikategorikan Sangat Baik. Meskipun beban anggaran meningkat secara masif dibandingkan tahun sebelumnya, instansi mampu menjaga tingkat penyerapan tetap tinggi (di atas 90%), yang menunjukkan tata kelola distribusi hibah yang responsif dan akuntabel.

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	478.836.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
Jumlah	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp629.850.990,00) atau (90,86%).

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	196.948.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Modal Komputer	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	257.888.000,00
Jumlah	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	478.836.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp425.208.000,00) atau (88,80%).

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	161.993.500,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.954.500,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	196.948.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp196.948.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.1.1.1 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	91.093.500,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	161.993.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp161.993.500,00) atau (100,00%).

Pada Tahun Anggaran 2025, seluruh pos yang berkaitan dengan Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Mebel, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, dan Alat Pemadam Kebakaran) mencatatkan angka Rp0,00 baik pada pagu anggaran maupun realisasinya

5.1.1.2.1.1.2 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Berikut ini adalah Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.954.500,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	34.954.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp34.954.500,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp24.000.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.1.2.1 Belanja Modal Alat Studio

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp24.000.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.1.3 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Komputer	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	87.258.000,00
Jumlah	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	257.888.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp204.260.000,00) atau (79,20%).

5.1.1.2.1.3.1 Belanja Modal Komputer Unit

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer Unit yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Personal Computer	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00
Jumlah	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer Unit TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp132.002.000,00) atau (77,36%).

- Realisasi Belanja Modal Personal Computer pada TA 2025 tercatat sebesar Rp38.628.000,00 atau mencapai 98,15% dari total pagu anggaran sebesar Rp39.355.200,00.
- Capaian realisasi Belanja Modal Personal Computer TA 2025 sebesar 98,15% dikategorikan Sangat Optimal. Meskipun secara nominal terjadi penurunan drastis dibandingkan tahun 2024, unit kerja berhasil mengeksekusi pengadaan tahun ini dengan sangat akurat dan efisien, memastikan ketersediaan perangkat teknologi informasi tetap terjaga untuk mendukung operasional.

5.1.1.2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	18.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	69.258.000,00
Jumlah	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	87.258.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp72.258.000,00) atau (82,81%).

- Total realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer pada TA 2025 tercatat sebesar Rp15.000.000,00 atau mencapai 88,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp16.908.400,00.
- Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2025 sebesar 88,71% menunjukkan fokus pada pemeliharaan dan peningkatan skala kecil untuk peralatan personal computer. Penurunan drastis dibandingkan TA 2024 mencerminkan bahwa instansi telah menyelesaikan siklus investasi infrastruktur teknologi informasi (khususnya jaringan) pada tahun lalu, sehingga anggaran tahun 2025 dapat diefisiensikan untuk keperluan operasional lainnya.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
Jumlah	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp189.757.990,00) atau (95,11%).

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
Jumlah	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp189.757.990,00) atau (95,11%).

5.1.1.2.2.1.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	199.516.000,00
Belanja Modal Taman	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	0,00
Jumlah	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp189.757.990,00) atau (95,11%).

- Total realisasi pada kategori ini di TA 2025 tercatat sebesar Rp9.758.010,00 atau mencapai 97,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp10.000.000,00
- Capaian realisasi TA 2025 sebesar 97,58% dikategorikan Sangat Optimal. Rendahnya angka realisasi dibandingkan tahun sebelumnya bukan menunjukkan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan tuntasnya proyek konstruksi gedung di tahun 2024, sehingga pada tahun 2025 anggaran hanya difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan area pendukung (taman) dengan nilai yang lebih efisien.

5.1.1.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp14.885.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.3.1 Belanja Modal Jaringan

Berikut ini adalah Belanja Modal Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jaringan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp14.885.000,00) atau (100,00%).

5.1.1.2.3.1.1 Belanja Modal Jaringan Listrik

Berikut ini adalah Belanja Modal Jaringan Listrik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp14.885.000,00) atau (100,00%).

Terjadi penurunan drastis dalam aktivitas belanja modal jaringan listrik dari tahun 2024 ke 2025. Dari realisasi sebesar Rp14,88 juta di tahun lalu menjadi nihil di tahun ini. Secara administratif, persentase penyerapan tahun 2025 dinyatakan sebesar 0% karena tidak adanya pagu anggaran yang ditetapkan.

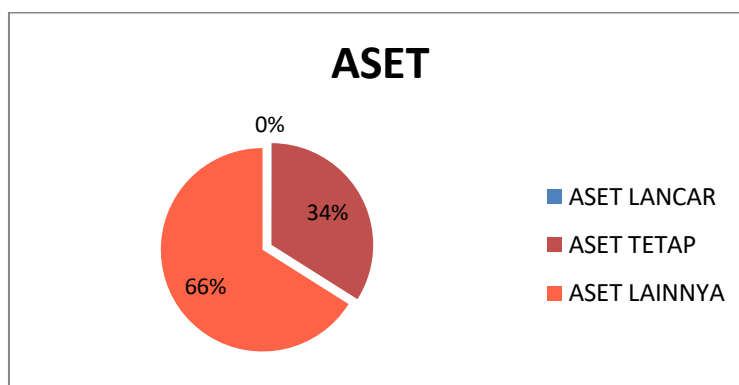
5.2 NERACA

5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31
ASET TETAP	7.509.714.783,00	7.689.373.309,00	(179.658.526,00)	(2,34)
ASET LAINNYA	14.623.000.276,54	12.405.997.276,54	2.217.003.000,00	17,87
Jumlah	22.143.999.114,54	20.103.709.895,54	2.040.289.219,00	10,15

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.040.289.219,00 atau 10,15%.

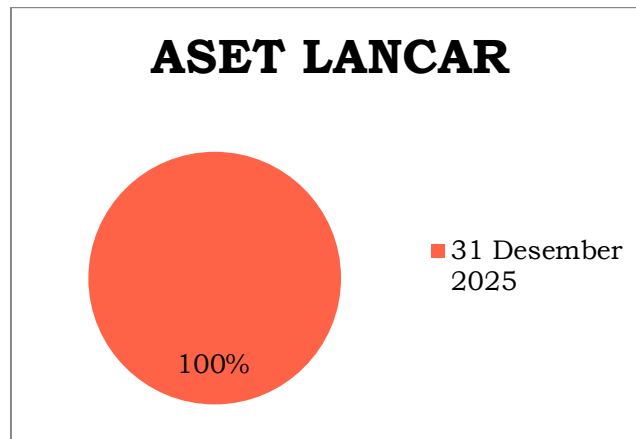


5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31
Jumlah	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.944.745,00 atau 35,31%.



5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31
Jumlah	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.944.745,00 atau 35,31%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31
Jumlah	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.944.745,00 atau 35,31%.

5.2.1.1.1.1.1 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Tulis Kantor	2.943.055,00	401.310,00	2.541.745,00	633,36
Kertas dan Cover	6.696.000,00	2.764.000,00	3.932.000,00	142,26
Bahan Cetak	1.095.000,00	76.000,00	1.019.000,00	1.340,79
Benda Pos	550.000,00	510.000,00	40.000,00	7,84
Bahan Komputer	0,00	4.514.000,00	(4.514.000,00)	(100,00)
Alat Listrik	0,00	74.000,00	(74.000,00)	(100,00)
Jumlah	11.284.055,00	8.339.310,00	2.944.745,00	35,31

Tabel di atas menunjukkan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.944.745,00 atau 35,31%.

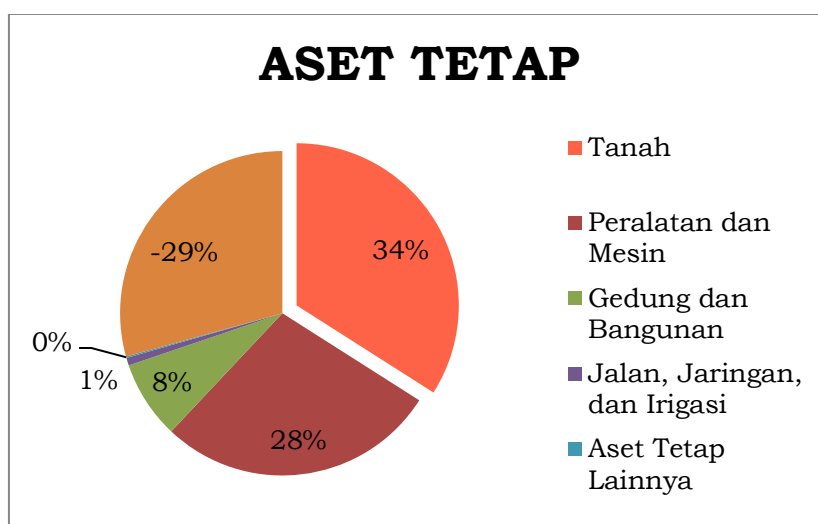
- Alat Tulis Kantor (ATK): Mengalami peningkatan sebesar 633,36% dari tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar Rp2.541.745,00 ini merepresentasikan peningkatan aktivitas administrasi harian kantor
- Kertas dan Cover: Terdapat kenaikan sebesar Rp3.932.000,00 (142,26%). Hal ini berkaitan erat dengan penyiapan dokumen fisik, laporan berkala, serta penjlidan yang lebih intensif pada periode 2025.
- Bahan Cetak: Secara persentase, pos ini mengalami lonjakan paling tajam yaitu 1.340,79%. Realisasi sebesar Rp1.095.000,00 digunakan untuk pengadaan cetakan khusus yang volumenya meningkat drastis dibanding tahun 2024.
- Benda Pos: Mengalami kenaikan moderat sebesar Rp40.000,00 (7,84%), yang menunjukkan stabilitas dalam aktivitas pengiriman surat-menyurat dan korespondensi fisik.
- Bahan Komputer: Turun sebesar 100,00% (Rp4.514.000,00). Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan sisa stok tinta/toner dari periode sebelumnya atau tidak adanya kebutuhan penggantian komponen habis pakai komputer di tahun berjalan.
- Alat Listrik: Mengalami penurunan sebesar 100,00% (Rp74.000,00), dikarenakan tidak adanya penggantian material listrik (seperti lampu atau kabel) pada periode ini.

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.078.587.114,00	5.392.028.714,00	(313.441.600,00)	(5,81)
Gedung dan Bangunan	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00	(44.600.000,00)	(3,06)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.978.800,00	137.978.800,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.316.072.649,00)	(5.494.455.723,00)	178.383.074,00	(3,25)
Jumlah	7.509.714.783,00	7.689.373.309,00	(179.658.526,00)	(2,34)

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp179.658.526,00) atau (2,34%).



5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah Persil per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

- Nilai Perolehan: Saldo sebesar Rp6.171.200.000,00 merupakan akumulasi nilai perolehan aset tanah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional instansi.
- Mutasi Tambah/Kurang: Selama periode tahun anggaran 2025, tidak terdapat aktivitas pengadaan (pembelian) tanah baru maupun penghapusan/pelepasan aset tanah. Hal ini menyebabkan saldo tetap konsisten dengan tahun sebelumnya.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.296.145.200,00	1.471.225.000,00	(175.079.800,00)	(11,90)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	124.042.600,00	124.042.600,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	21.499.450,00	21.499.450,00	0,00	0,00
Komputer	1.219.370.464,00	1.357.732.264,00	(138.361.800,00)	(10,19)
Peralatan Proses/Produksi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.078.587.114,00	5.392.028.714,00	(313.441.600,00)	(5,81)

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp313.441.600,00) atau (5,81%).

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00	0,00	0,00
Jumlah	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.1.1 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.370.178.600,00	2.370.178.600,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.350.800,00	41.350.800,00	0,00	0,00
Jumlah	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

- Tidak ada pengadaan (belanja modal) kendaraan baru baik roda empat maupun roda dua pada tahun berjalan.
- Tidak ada penghapusan aset atau penjualan (divestasi) terhadap kendaraan yang telah terdaftar dalam inventaris organisasi.
- Seluruh kendaraan masih tercatat dengan nilai perolehan yang sama seperti periode laporan tahun sebelumnya.

5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Kantor	195.352.500,00	279.171.000,00	(83.818.500,00)	(30,02)
Alat Rumah Tangga	958.645.600,00	1.049.906.900,00	(91.261.300,00)	(8,69)
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	142.147.100,00	142.147.100,00	0,00	0,00
Jumlah	1.296.145.200,00	1.471.225.000,00	(175.079.800,00)	(11,90)

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp175.079.800,00) atau (11,90%).

5.2.1.2.2.2.1 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	100.392.500,00	142.192.500,00	(41.800.000,00)	(29,40)
Alat Kantor Lainnya	94.960.000,00	136.978.500,00	(42.018.500,00)	(30,68)
Jumlah	195.352.500,00	279.171.000,00	(83.818.500,00)	(30,02)

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.818.500,00) atau (30,02%).

- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor: Mengalami penurunan sebesar Rp41.800.000,00 (29,40%).
- Alat Kantor Lainnya: Mengalami penurunan sebesar Rp42.018.500,00 (30,68%).

5.2.1.2.2.2 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Mebel	423.318.800,00	449.966.300,00	(26.647.500,00)	(5,92)
Alat Pembersih	14.759.300,00	16.696.100,00	(1.936.800,00)	(11,60)
Alat Pendingin	191.589.500,00	254.266.500,00	(62.677.000,00)	(24,65)
Alat Dapur	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	320.728.000,00	320.728.000,00	0,00	0,00
Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	958.645.600,00	1.049.906.900,00	(91.261.300,00)	(8,69)

Tabel di atas menunjukkan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp91.261.300,00) atau (8,69%).

- Penurunan Signifikan pada Alat Pendingin: Terjadi pengurangan nilai sebesar Rp62.677.000,00 (24,65%)
- Pengurangan pada Mebel dan Alat Pembersih: Terdapat penurunan nilai masing-masing sebesar 5,92% dan 11,60%

5.2.1.2.2.3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Meja Kerja Pejabat	36.259.600,00	36.259.600,00	0,00	0,00
Meja Rapat Pejabat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	95.087.500,00	95.087.500,00	0,00	0,00
Jumlah	142.147.100,00	142.147.100,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.3 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Studio	24.222.000,00	24.222.000,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi	99.820.600,00	99.820.600,00	0,00	0,00
Jumlah	124.042.600,00	124.042.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.3.1 Alat Studio

Saldo Alat Studio yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Studio Audio	12.722.000,00	12.722.000,00	0,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	24.222.000,00	24.222.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.3.2 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Komunikasi Telephone	99.820.600,00	99.820.600,00	0,00	0,00
Jumlah	99.820.600,00	99.820.600,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Komunikasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.4 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	21.499.450,00	21.499.450,00	0,00	0,00
Jumlah	21.499.450,00	21.499.450,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.4.1 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamica yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Umum	21.499.450,00	21.499.450,00	0,00	0,00
Jumlah	21.499.450,00	21.499.450,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.5 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Unit	823.190.944,00	923.139.244,00	(99.948.300,00)	(10,83)
Peralatan Komputer	396.179.520,00	434.593.020,00	(38.413.500,00)	(8,84)
Jumlah	1.219.370.464,00	1.357.732.264,00	(138.361.800,00)	(10,19)

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp138.361.800,00) atau (10,19%).

5.2.1.2.2.5.1 Komputer Unit

Saldo Komputer Unit yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Jaringan	103.447.845,00	103.447.845,00	0,00	0,00
Personal Computer	719.743.099,00	819.691.399,00	(99.948.300,00)	(12,19)
Jumlah	823.190.944,00	923.139.244,00	(99.948.300,00)	(10,83)

Tabel di atas menunjukkan Komputer Unit per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp99.948.300,00) atau (10,83%).

- Penurunan pada Personal Computer (PC): Terdapat pengurangan nilai aset sebesar Rp99.948.300,00 atau 12,19%
- Saldo Tetap pada Komputer Jaringan: Akun ini tidak mengalami mutasi dengan nilai tetap sebesar Rp103.447.845,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan infrastruktur jaringan (server, router, hub) maupun penghapusan pada perangkat jaringan yang ada sepanjang tahun 2025.

5.2.1.2.2.5.2 Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
--------	------------------	------------------	----------------------	---

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Mainframe	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Peralatan Mini Computer	25.635.000,00	25.635.000,00	0,00	0,00
Peralatan Personal Computer	132.906.500,00	151.756.500,00	(18.850.000,00)	(12,42)
Peralatan Jaringan	222.638.020,00	242.201.520,00	(19.563.500,00)	(8,08)
Peralatan Komputer Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	396.179.520,00	434.593.020,00	(38.413.500,00)	(8,84)

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp38.413.500,00) atau (8,84%).

5.2.1.2.2.6 Peralatan Proses/Produksi

Saldo Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Unit Peralatan Proses/Produksi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.6.1 Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Transport and Storage Equipment for Liquid	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Unit Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00	(44.600.000,00)	(3,06)
Jumlah	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00	(44.600.000,00)	(3,06)

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp44.600.000,00) atau (3,06%).

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.335.191.518,00	1.335.191.518,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	76.530.000,00	121.130.000,00	(44.600.000,00)	(36,82)
Jumlah	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00	(44.600.000,00)	(3,06)

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp44.600.000,00) atau (3,06%).

5.2.1.2.3.1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Kantor	744.044.093,00	744.044.093,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	262.146.000,00	262.146.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	34.032.000,00	34.032.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	294.969.425,00	294.969.425,00	0,00	0,00
Jumlah	1.335.191.518,00	1.335.191.518,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.3.1.2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Rumah Negara Golongan II	51.530.000,00	51.530.000,00	0,00	0,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	25.000.000,00	69.600.000,00	(44.600.000,00)	(64,08)
Jumlah	76.530.000,00	121.130.000,00	(44.600.000,00)	(36,82)

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp44.600.000,00) atau (36,82%).

- Penurunan pada Mess/Wisma/Bungalow: Terjadi pengurangan nilai yang cukup drastis sebesar Rp44.600.000,00 atau 64,08%. Penurunan ini menunjukkan adanya aktivitas penghapusan aset, baik karena bangunan tersebut sudah rusak berat

- Saldo Tetap pada Rumah Negara Golongan II: Nilai aset tetap bertahan pada angka Rp51.530.000,00. Hal ini menandakan tidak ada penambahan bangunan baru maupun penghapusan pada sub-kelompok rumah negara selama tahun berjalan.

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi	107.134.800,00	107.134.800,00	0,00	0,00
Jaringan	30.844.000,00	30.844.000,00	0,00	0,00
Jumlah	137.978.800,00	137.978.800,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.1 Instalasi

Saldo Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Gardu Listrik	107.134.800,00	107.134.800,00	0,00	0,00
Jumlah	107.134.800,00	107.134.800,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.1.1 Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	107.134.800,00	107.134.800,00	0,00	0,00
Jumlah	107.134.800,00	107.134.800,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.2 Jaringan

Saldo Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jaringan Telepon	30.844.000,00	30.844.000,00	0,00	0,00
Jumlah	30.844.000,00	30.844.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.2.1 Jaringan Telepon

Saldo Jaringan Telepon yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jaringan Telepon di atas Tanah	30.844.000,00	30.844.000,00	0,00	0,00
Jumlah	30.844.000,00	30.844.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jaringan Telepon per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00
Jumlah	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.5.1 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Bercorak Kebudayaan	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00
Jumlah	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.5.1.1 Alat Bercorak Kebudayaan

Saldo Alat Bercorak Kebudayaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pahatan	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00
Jumlah	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.646.797.889,00)	(4.848.618.256,00)	201.820.367,00	(4,16)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)	(19.410.121,00)	3,42
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(56.346.283,00)	(52.319.111,00)	(4.027.172,00)	7,70
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(5.316.072.649,00)	(5.494.455.723,00)	178.383.074,00	(3,25)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp178.383.074,00) atau (3,25%).

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.411.529.400,00)	(2.411.529.400,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.120.409.982,00)	(1.221.414.753,00)	101.004.771,00	(8,27)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(123.609.267,00)	(123.409.267,00)	(200.000,00)	0,16
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(20.998.594,00)	(19.565.297,00)	(1.433.297,00)	7,33
Akumulasi Penyusutan Komputer	(966.750.646,00)	(1.070.399.539,00)	103.648.893,00	(9,68)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(3.500.000,00)	(2.300.000,00)	(1.200.000,00)	52,17
Jumlah	(4.646.797.889,00)	(4.848.618.256,00)	201.820.367,00	(4,16)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp201.820.367,00) atau (4,16%).

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.370.178.600,00)	(2.370.178.600,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(41.350.800,00)	(41.350.800,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.411.529.400,00)	(2.411.529.400,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(100.392.500,00)	(141.502.500,00)	41.110.000,00	(29,05)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(93.475.000,00)	(126.501.000,00)	33.026.000,00	(26,11)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(356.624.538,00)	(365.873.538,00)	9.249.000,00	(2,53)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(14.759.300,00)	(16.631.540,00)	1.872.240,00	(11,26)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(154.242.750,00)	(192.822.751,00)	38.580.001,00	(20,01)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(285.478.000,00)	(273.456.632,00)	(12.021.368,00)	4,40
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.983.335,00)	(583.335,00)	(1.400.000,00)	240,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(36.259.600,00)	(36.259.600,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(10.800.000,00)	(10.800.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(65.144.959,00)	(55.733.857,00)	(9.411.102,00)	16,89
Jumlah	(1.120.409.982,00)	(1.221.414.753,00)	101.004.771,00	(8,27)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp101.004.771,00) atau (8,27%).

- Terdapat penurunan nilai akumulasi pada akun *Alat Penyimpan Kantor, Alat Pendingin, dan Mebel*. Hal ini bukan disebabkan oleh penyusutan yang berkurang, melainkan karena adanya Penghapusan Aset (Disposal). Ketika aset dihapus dari buku inventaris, maka akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut juga dihapuskan, sehingga saldo total akumulasi di neraca menurun.
- Kenaikan terlihat pada *Alat Rumah Tangga Lainnya, Alat Pemadam Kebakaran, dan Kursi Kerja Pejabat*. Kenaikan ini mencerminkan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2025 atas aset-aset yang masih aktif digunakan sesuai dengan masa manfaatnya.

5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(12.288.667,00)	(12.088.667,00)	(200.000,00)	1,65
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(11.500.000,00)	(11.500.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(99.820.600,00)	(99.820.600,00)	0,00	0,00
Jumlah	(123.609.267,00)	(123.409.267,00)	(200.000,00)	0,16

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 atau 0,16%.

- Terjadi penambahan akumulasi penyusutan pada sub-kelompok Peralatan Studio Audio sebesar Rp200.000,00. Hal ini menunjukkan pengakuan beban penyusutan periodik atas aset yang masih memiliki masa manfaat pada tahun 2025.
- Pada sub-kelompok Peralatan Studio Video dan Film serta Alat Komunikasi Telephone, saldo akumulasi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aset-aset tersebut kemungkinan besar telah habis masa manfaatnya (nilai buku Rp0 atau nilai residu) namun secara fisik masih tercatat dalam daftar inventaris, sehingga tidak ada lagi beban penyusutan yang diakui pada tahun berjalan.

5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(20.998.594,00)	(19.565.297,00)	(1.433.297,00)	7,33
Jumlah	(20.998.594,00)	(19.565.297,00)	(1.433.297,00)	7,33

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.433.297,00 atau 7,33%.

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Komputer

Saldo Akumulasi Penyusutan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(51.847.859,00)	(32.186.679,00)	(19.661.180,00)	61,08
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(555.735.473,00)	(639.952.860,00)	84.217.387,00	(13,16)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(3.800.000,00)	(3.800.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(25.635.000,00)	(25.635.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(105.406.500,00)	(133.716.186,00)	28.309.686,00	(21,17)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(216.159.147,00)	(229.742.147,00)	13.583.000,00	(5,91)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(8.166.667,00)	(5.366.667,00)	(2.800.000,00)	52,17
Jumlah	(966.750.646,00)	(1.070.399.539,00)	103.648.893,00	(9,68)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp103.648.893,00) atau (9,68%).

- Meskipun terdapat penambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar kurang lebih Rp22,4 juta (dari kelompok yang naik), saldo akumulasi secara total turun sebesar 9,68% dikarenakan nilai akumulasi penyusutan dari aset-aset yang dihapuskan (terutama PC) jauh lebih besar nilainya. Hal ini selaras dengan data Laporan Aset yang menunjukkan penurunan nilai perolehan pada periode yang sama.

5.2.1.2.6.1.6 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(3.500.000,00)	(2.300.000,00)	(1.200.000,00)	52,17
Jumlah	(3.500.000,00)	(2.300.000,00)	(1.200.000,00)	52,17

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.200.000,00 atau 52,17%.

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)	(19.410.121,00)	3,42
Jumlah	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)	(19.410.121,00)	3,42

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp19.410.121,00 atau 3,42%.

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(432.960.830,00)	(417.125.550,00)	(15.835.280,00)	3,80
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(54.976.402,00)	(49.208.338,00)	(5.768.064,00)	11,72
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(9.869.280,00)	(9.188.640,00)	(680.640,00)	7,41
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(60.766.015,00)	(55.209.811,00)	(5.556.204,00)	10,06
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(14.514.283,00)	(13.483.683,00)	(1.030.600,00)	7,64
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(13.541.667,00)	(23.002.334,00)	9.460.667,00	(41,13)
Jumlah	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)	(19.410.121,00)	3,42

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp19.410.121,00 atau 3,42%.

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(43.077.118,00)	(40.398.748,00)	(2.678.370,00)	6,63
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13.269.165,00)	(11.920.363,00)	(1.348.802,00)	11,32
Jumlah	(56.346.283,00)	(52.319.111,00)	(4.027.172,00)	7,70

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.027.172,00 atau 7,70%.

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Instalasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(43.077.118,00)	(40.398.748,00)	(2.678.370,00)	6,63
Jumlah	(43.077.118,00)	(40.398.748,00)	(2.678.370,00)	6,63

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.678.370,00 atau 6,63%.

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(13.269.165,00)	(11.920.363,00)	(1.348.802,00)	11,32
Jumlah	(13.269.165,00)	(11.920.363,00)	(1.348.802,00)	11,32

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.348.802,00 atau 11,32%.

5.2.1.2.6.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.6.4.1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)	0,00	0,00

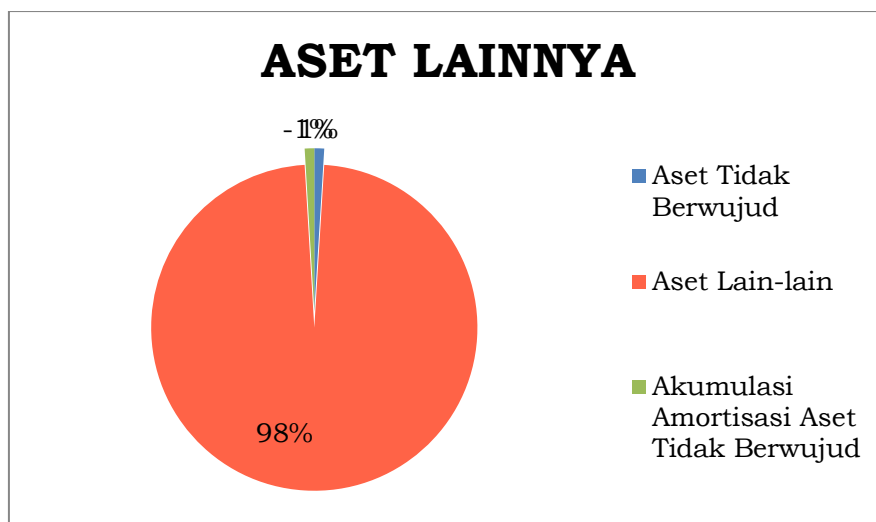
Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	144.896.700,00	144.896.700,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54	2.221.799.000,00	17,92
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)	(4.796.000,00)	3,52
Jumlah	14.623.000.276,54	12.405.997.276,54	2.217.003.000,00	17,87

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.217.003.000,00 atau 17,87%.



5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	144.896.700,00	144.896.700,00	0,00	0,00
Jumlah	144.896.700,00	144.896.700,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54	2.221.799.000,00	17,92
Jumlah	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54	2.221.799.000,00	17,92

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.221.799.000,00 atau 17,92%.

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)	(4.796.000,00)	3,52
Jumlah	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)	(4.796.000,00)	3,52

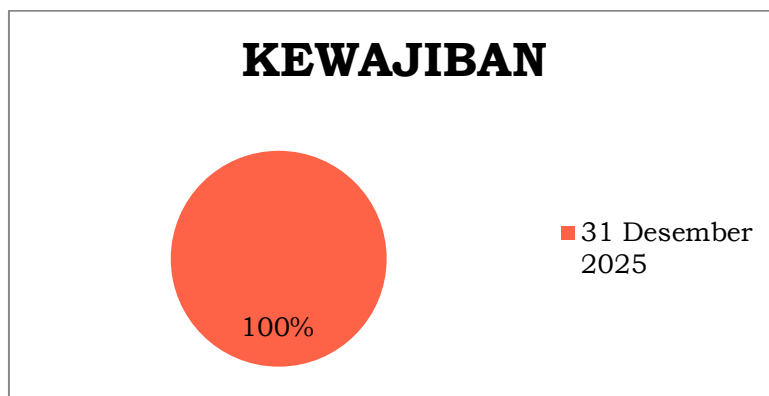
Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.796.000,00 atau 3,52%.

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	445.582.222,00	366.258.325,00	79.323.897,00	21,66
Jumlah	445.582.222,00	366.258.325,00	79.323.897,00	21,66

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp79.323.897,00 atau 21,66%.

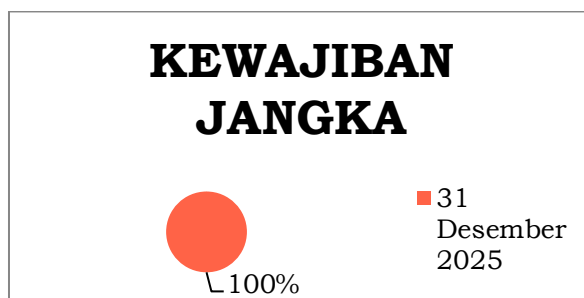


5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	445.582.222,00	366.258.325,00	79.323.897,00	21,66
Jumlah	445.582.222,00	366.258.325,00	79.323.897,00	21,66

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp79.323.897,00 atau 21,66%.



5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	433.967.527,00	353.851.802,00	80.115.725,00	22,64
Utang Belanja Barang dan Jasa	11.614.695,00	12.406.523,00	(791.828,00)	(6,38)
Jumlah	445.582.222,00	366.258.325,00	79.323.897,00	21,66

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp79.323.897,00 atau 21,66%.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.205.415,00	9.684.638,00	37.520.777,00	387,43
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	386.762.112,00	344.167.164,00	42.594.948,00	12,38
Jumlah	433.967.527,00	353.851.802,00	80.115.725,00	22,64

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp80.115.725,00 atau 22,64%.

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.529.849,00	0,00	37.529.849,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.012.038,00	9.684.638,00	(672.600,00)	(6,95)
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	663.528,00	0,00	663.528,00	0,00
Jumlah	47.205.415,00	9.684.638,00	37.520.777,00	387,43

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp37.520.777,00 atau 387,43%.

- Pengakuan Utang Tunjangan PPh PNS: Munculnya saldo sebesar Rp37.529.849,00 yang sebelumnya nol pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban atas pemotongan atau tunjangan pajak

penghasilan Pasal 21 yang melekat pada gaji/tunjangan bulan Desember 2025 yang baru akan disetorkan ke kas negara pada periode berikutnya.

- Iuran Jaminan Kesehatan PNS: Mengalami penurunan moderat sebesar Rp672.600,00 (6,95%). Hal ini mengindikasikan adanya sedikit penurunan pada basis perhitungan iuran (seperti penurunan jumlah personil PNS atau perubahan komponen gaji yang menjadi dasar pengali iuran BPJS).
- Kepesertaan PPPK: Sama halnya dengan akun TPP sebelumnya, muncul utang Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp663.528,00. Ini merupakan bukti sinkronisasi kebijakan dimana ASN kategori PPPK kini telah terakomodasi dalam jaminan kesehatan yang ditanggung oleh entitas.

5.2.2.1.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	216.778.876,00	5.366.513,00	211.412.363,00	3.939,47
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.647.550,00	0,00	11.647.550,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	44.785.708,00	246.375.277,00	(201.589.569,00)	(81,82)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	108.609.344,00	92.425.374,00	16.183.970,00	17,51
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.940.634,00	0,00	4.940.634,00	0,00
Jumlah	386.762.112,00	344.167.164,00	42.594.948,00	12,38

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp42.594.948,00 atau 12,38%.

- Saldo ini mencerminkan kewajiban pemerintah daerah/entitas atas hak tambahan penghasilan pegawai untuk bulan Desember 2025 yang pembayarannya secara administratif baru dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya
- Peralihan Struktur TPP PNS: Terjadi perubahan komposisi yang sangat kontras antara komponen Beban Kerja dan Kondisi Kerja. Penurunan tajam pada TPP Kondisi Kerja (-81,82%) yang dibarengi lonjakan drastis pada TPP Beban Kerja (+3.939,47%) mengindikasikan adanya perubahan kebijakan internal atau perubahan nomenklatur pemberian tunjangan sesuai peraturan kepala daerah terbaru.
- Pengakuan Hak PPPK: Pada tahun 2025, muncul pengakuan kewajiban TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik pada sub-

kelompok Beban Kerja maupun Prestasi Kerja. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah personil PPPK atau pemberlakuan kebijakan remunerasi baru bagi non-PNS pada tahun berjalan.

- Kenaikan TPP Prestasi Kerja: Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 17,51%, yang menunjukkan peningkatan realisasi capaian kinerja pegawai atau penyesuaian unit cost atas prestasi kerja PNS di akhir tahun.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	11.614.695,00	12.406.523,00	(791.828,00)	(6,38)
Jumlah	11.614.695,00	12.406.523,00	(791.828,00)	(6,38)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp791.828,00) atau (6,38%).

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	799.091,00	2.014.323,00	(1.215.232,00)	(60,33)
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	150.450,00	434.050,00	(283.600,00)	(65,34)
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	10.665.154,00	9.958.150,00	707.004,00	7,10
Jumlah	11.614.695,00	12.406.523,00	(791.828,00)	(6,38)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp791.828,00) atau (6,38%).

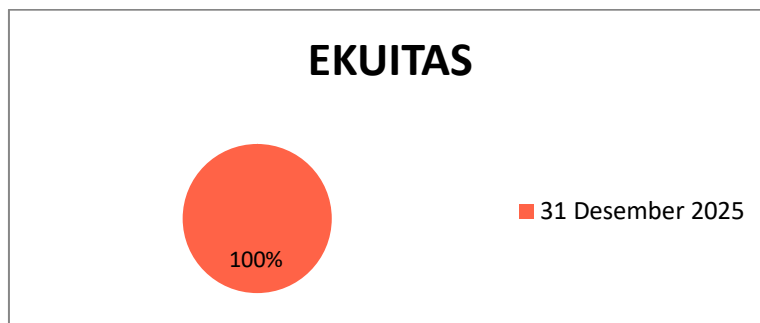
- Penurunan Utang Telepon & Air: Terjadi penurunan signifikan pada tagihan telepon (60,33%) dan air (65,34%). Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan layanan atau penurunan tarif/volume pemakaian pada akhir tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Kenaikan Utang Listrik: Berbeda dengan utilitas lainnya, tagihan listrik mengalami kenaikan sebesar Rp707.004,00 (7,10%). Kenaikan ini dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional kantor atau penyesuaian tarif dasar listrik yang berdampak pada nilai tagihan bulan Desember yang terutang.

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
EKUITAS	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54	1.960.965.322,00	9,94
Jumlah	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54	1.960.965.322,00	9,94

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.960.965.322,00 atau 9,94%.



5.2.3.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	19.739.239.570,54	19.093.599.689,54	645.639.881,00	3,38
Surplus/Defisit-LO	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)	(4.822.400.493,00)	24,51
Jumlah	(4.759.723.032,46)	(582.962.420,46)	(4.176.760.612,00)	716,47

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.176.760.612,00 atau 716,47%.

5.2.3.1.1.1 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)	(4.822.400.493,00)	24,51
Jumlah	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)	(4.822.400.493,00)	24,51

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.822.400.493,00 atau 24,51%.

5.2.3.1.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
--------	------------------	------------------	----------------------	---

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RK PPKD	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00	6.137.725.934,00	30,20
Jumlah	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00	6.137.725.934,00	30,20

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.137.725.934,00 atau 30,20%.

5.2.3.1.2.1 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RK PPKD	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00	6.137.725.934,00	30,20
Jumlah	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00	6.137.725.934,00	30,20

Tabel di atas menunjukkan RK PPKD per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.137.725.934,00 atau 30,20%.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN OPERASI	24.498.930.323,00	19.676.562.110,00	4.822.368.213,00	24,51
Jumlah	24.498.930.323,00	19.676.562.110,00	4.822.368.213,00	24,51

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp 4.822.368.213,00 atau 24,51

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	10.731.462.712,00	9.087.323.356,00	1.644.139.356,00	18,09
Beban Barang dan Jasa	9.118.056.698,00	8.876.446.173,00	241.610.525,00	2,72
Beban Hibah	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
Beban Penyusutan dan Amortisasi	203.410.913,00	206.392.581,00	(2.981.668,00)	(1,44)
Jumlah	24.498.930.323,00	19.676.562.110,00	4.822.368.213,00	24,51

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.822.368.213,00 atau 24,51%.

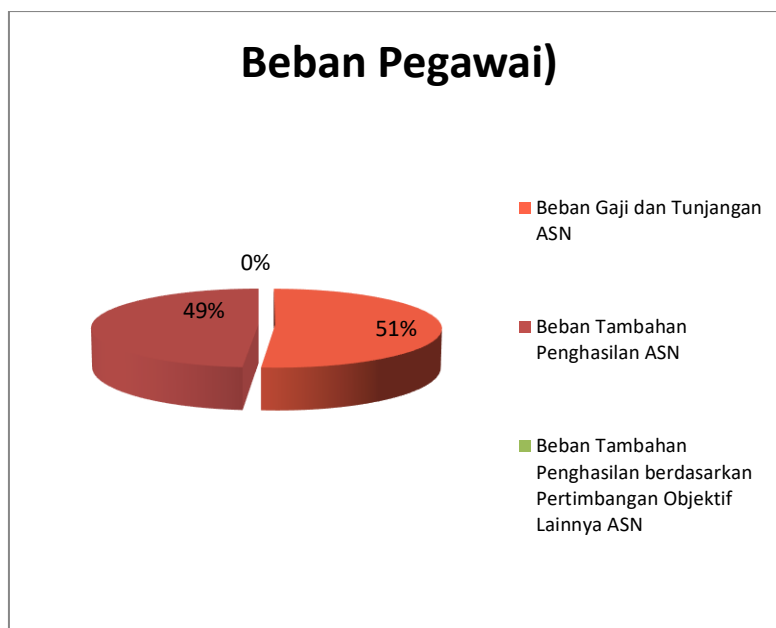
- Beban pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp10.731.462.712,00, mengalami kenaikan Rp1.644.139.356,00 atau 18,09% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9.087.323.356,00. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai dan/atau penyesuaian komponen penghasilan pegawai.
- Beban barang dan jasa tercatat sebesar Rp9.118.056.698,00, meningkat Rp241.610.525,00 atau 2,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.876.446.173,00. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas operasional pada tahun 2025.
- Beban hibah mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%, dari Rp1.506.400.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp4.446.000.000,00 pada tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penyaluran hibah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun berjalan.
- Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp203.410.913,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.981.668,00 atau 1,44% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp206.392.581,00. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya masa manfaat beberapa aset tetap dan aset tidak berwujud.

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.514.552.470,00	3.715.475.655,00	1.799.076.815,00	48,42
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.216.910.242,00	5.310.647.701,00	(93.737.459,00)	(1,77)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.731.462.712,00	9.087.323.356,00	1.644.139.356,00	18,09

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.644.139.356,00 atau 18,09%.



5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	3.617.660.831,00	2.668.200.552,00	949.460.279,00	35,58
Beban Tunjangan Keluarga ASN	349.130.574,00	261.215.558,00	87.915.016,00	33,66
Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.130.000,00	122.290.000,00	7.840.000,00	6,41
Beban Tunjangan Fungsional ASN	184.131.429,00	164.110.000,00	20.021.429,00	12,20
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.425.000,00	73.745.000,00	43.680.000,00	59,23
Beban Tunjangan Beras ASN	194.411.490,00	133.325.220,00	61.086.270,00	45,82
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	616.438.447,00	40.615.874,00	575.822.573,00	1.417,73
Beban Pembulatan Gaji ASN	53.417,00	34.730,00	18.687,00	53,81
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	274.125.917,00	230.046.164,00	44.079.753,00	19,16
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.761.412,00	5.473.115,00	2.288.297,00	41,81
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	23.283.953,00	16.419.442,00	6.864.511,00	41,81
Jumlah	5.514.552.470,00	3.715.475.655,00	1.799.076.815,00	48,42

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.799.076.815,00 atau 48,42%.

5.3.1.1.1.1.1 Beban Gaji Pokok ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo

Beban Gaji Pokok ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.484.576.899,00	2.640.402.552,00	(155.825.653,00)	(5,90)
Beban Gaji Pokok PPPK	1.133.083.932,00	27.798.000,00	1.105.285.932,00	3.976,13
Jumlah	3.617.660.831,00	2.668.200.552,00	949.460.279,00	35,58

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji Pokok ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp949.460.279,00 atau 35,58%.

- Beban gaji pokok PNS pada tahun 2025 sebesar Rp2.484.576.899,00, mengalami penurunan sebesar Rp155.825.653,00 atau 5,90% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2.640.402.552,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS aktif, antara lain karena pensiun dan/atau mutasi pegawai.
- Beban gaji pokok PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.133.083.932,00, meningkat signifikan sebesar Rp1.105.285.932,00 atau 3.976,13% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27.798.000,00. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai PPPK pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.2 Beban Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Keluarga PNS	240.958.482,00	259.225.310,00	(18.266.828,00)	(7,05)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	108.172.092,00	1.990.248,00	106.181.844,00	5.335,11
Jumlah	349.130.574,00	261.215.558,00	87.915.016,00	33,66

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Keluarga ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp87.915.016,00 atau 33,66%.

- Beban tunjangan keluarga PNS pada tahun 2025 sebesar Rp240.958.482,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.266.828,00 atau 7,05% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp259.225.310,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang berhak menerima tunjangan keluarga, antara lain akibat pensiun dan/atau perubahan status keluarga.
- Beban tunjangan keluarga PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp108.172.092,00, meningkat signifikan sebesar Rp106.181.844,00 atau 5.335,11% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.990.248,00. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah PPPK yang mulai menerima tunjangan keluarga pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.3 Beban Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Jabatan PNS	130.130.000,00	122.290.000,00	7.840.000,00	6,41
Jumlah	130.130.000,00	122.290.000,00	7.840.000,00	6,41

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Jabatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.840.000,00 atau 6,41%. Kenaikan beban tunjangan jabatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan struktur jabatan dan/atau peningkatan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang menerima tunjangan jabatan pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.4 Beban Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	166.178.930,00	160.240.000,00	5.938.930,00	3,71
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17.952.499,00	3.870.000,00	14.082.499,00	363,89
Jumlah	184.131.429,00	164.110.000,00	20.021.429,00	12,20

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp20.021.429,00 atau 12,20%.

- Beban tunjangan fungsional PNS pada tahun 2025 sebesar Rp166.178.930,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.938.930,00 atau 3,71% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp160.240.000,00. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian kelas jabatan fungsional dan/atau peningkatan jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional.
- Beban tunjangan fungsional PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp17.952.499,00, meningkat signifikan sebesar Rp14.082.499,00 atau 363,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.870.000,00. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah PPPK yang menduduki jabatan fungsional pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.215.000,00	73.745.000,00	(15.530.000,00)	(21,06)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	59.210.000,00	0,00	59.210.000,00	0,00
Jumlah	117.425.000,00	73.745.000,00	43.680.000,00	59,23

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp43.680.000,00 atau 59,23%.

- Beban tunjangan fungsional umum PNS pada tahun 2025 sebesar Rp58.215.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp15.530.000,00 atau 21,06% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp73.745.000,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum.
- Beban tunjangan fungsional umum PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp59.210.000,00, sementara pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi. Beban ini muncul sebagai dampak dari pengangkatan PPPK yang menduduki jabatan fungsional umum pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.6 Beban Tunjangan Beras ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Beras ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Beras PNS	124.345.140,00	132.021.660,00	(7.676.520,00)	(5,81)
Beban Tunjangan Beras PPPK	70.066.350,00	1.303.560,00	68.762.790,00	5.275,00
Jumlah	194.411.490,00	133.325.220,00	61.086.270,00	45,82

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Beras ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp61.086.270,00 atau 45,82%.

- Beban tunjangan beras PNS pada tahun 2025 sebesar Rp124.345.140,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.676.520,00 atau 5,81% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp132.021.660,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang berhak menerima tunjangan beras.
- Beban tunjangan beras PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp70.066.350,00, meningkat signifikan sebesar Rp68.762.790,00 atau 5.275,00% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.303.560,00. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah PPPK yang menerima tunjangan beras pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang

diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	612.054.703,00	40.615.874,00	571.438.829,00	1.406,93
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.383.744,00	0,00	4.383.744,00	0,00
Jumlah	616.438.447,00	40.615.874,00	575.822.573,00	1.417,73

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp575.822.573,00 atau 1.417,73%.

- Beban tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS pada tahun 2025 sebesar Rp612.054.703,00, meningkat sebesar Rp571.438.829,00 atau 1.406,93% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran tunjangan PPh dan/atau tunjangan khusus kepada PNS sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada tahun 2025.
- Beban tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.383.744,00, sementara pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi. Beban ini timbul sebagai akibat dari pengangkatan PPPK yang menerima tunjangan PPh dan/atau tunjangan khusus pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.8 Beban Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pembulatan Gaji ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.056,00	34.235,00	(2.179,00)	(6,36)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	21.361,00	495,00	20.866,00	4.215,35
Jumlah	53.417,00	34.730,00	18.687,00	53,81

Tabel di atas menunjukkan Beban Pembulatan Gaji ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp18.687,00 atau 53,81%.

- Beban pembulatan gaji PNS pada tahun 2025 sebesar Rp32.056,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.179,00 atau 6,36% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34.235,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang menerima pembulatan gaji.
- Beban pembulatan gaji PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp21.361,00, meningkat signifikan sebesar Rp20.866,00 atau 4.215,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp495,00, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah PPPK yang menerima gaji pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang diakui oleh

Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216.278.446,00	228.699.836,00	(12.421.390,00)	(5,43)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	57.847.471,00	1.346.328,00	56.501.143,00	4.196,68
Jumlah	274.125.917,00	230.046.164,00	44.079.753,00	19,16

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.079.753,00 atau 19,16%.

- Beban iuran jaminan kesehatan PNS pada tahun 2025 sebesar Rp216.278.446,00, mengalami penurunan sebesar Rp12.421.390,00 atau 5,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp228.699.836,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS peserta program atau penyesuaian iuran per individu.
- Beban iuran jaminan kesehatan PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp57.847.471,00, meningkat signifikan sebesar Rp56.501.143,00 atau 4.196,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.346.328,00, seiring dengan bertambahnya jumlah PPPK peserta program pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.084.510,00	5.406.398,00	(321.888,00)	(5,95)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.676.902,00	66.717,00	2.610.185,00	3.912,32
Jumlah	7.761.412,00	5.473.115,00	2.288.297,00	41,81

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.288.297,00 atau 41,81%.

- Beban iuran JKK PNS pada tahun 2025 sebesar Rp5.084.510,00, mengalami penurunan sebesar Rp321.888,00 atau 5,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.406.398,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS peserta program atau penyesuaian tarif iuran.
- Beban iuran JKK PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.676.902,00, meningkat signifikan sebesar Rp2.610.185,00 atau 3.912,32% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp66.717,00, seiring dengan bertambahnya jumlah PPPK peserta program pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu

rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.253.592,00	16.219.297,00	(965.705,00)	(5,95)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.030.361,00	200.145,00	7.830.216,00	3.912,27
Jumlah	23.283.953,00	16.419.442,00	6.864.511,00	41,81

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.864.511,00 atau 41,81%.

- Beban iuran JKM PNS pada tahun 2025 sebesar Rp15.253.592,00, mengalami penurunan sebesar Rp965.705,00 atau 5,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16.219.297,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS peserta program atau penyesuaian tarif iuran.
- Beban iuran JKM PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.030.361,00, meningkat signifikan sebesar Rp7.830.216,00 atau 3.912,27% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp200.145,00, seiring dengan bertambahnya jumlah PPPK peserta program pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.403.830.777,00	3.327.712.039,00	76.118.738,00	2,29
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	305.182.381,00	524.043.189,00	(218.860.808,00)	(41,76)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.507.897.084,00	1.458.892.473,00	49.004.611,00	3,36
Jumlah	5.216.910.242,00	5.310.647.701,00	(93.737.459,00)	(1,77)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp93.737.459,00) atau (1,77%).

5.3.1.1.1.2.1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.287.370.345,00	3.327.712.039,00	(40.341.694,00)	(1,21)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.460.432,00	0,00	116.460.432,00	0,00
Jumlah	3.403.830.777,00	3.327.712.039,00	76.118.738,00	2,29

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp76.118.738,00 atau 2,29%.

- Beban tambahan penghasilan PNS pada tahun 2025 sebesar Rp3.287.370.345,00, mengalami penurunan sebesar Rp40.341.694,00 atau 1,21% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.327.712.039,00. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan atau penyesuaian besaran beban kerja.
- Beban tambahan penghasilan PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp116.460.432,00, sementara pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi. Beban ini muncul akibat penambahan jumlah PPPK yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.2.2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	305.182.381,00	524.043.189,00	(218.860.808,00)	(41,76)
Jumlah	305.182.381,00	524.043.189,00	(218.860.808,00)	(41,76)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp218.860.808,00) atau (41,76%). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PNS yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, atau adanya penyesuaian besaran tambahan penghasilan sesuai evaluasi beban kerja dan kondisi di tahun 2025.

5.3.1.1.1.2.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.458.497.138,00	1.458.892.473,00	(395.335,00)	(0,03)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	49.399.946,00	0,00	49.399.946,00	0,00
Jumlah	1.507.897.084,00	1.458.892.473,00	49.004.611,00	3,36

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp49.004.611,00 atau 3,36%.

- Beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS pada tahun 2025 sebesar Rp1.458.497.138,00, mengalami penurunan tipis sebesar Rp395.335,00 atau 0,03% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.458.892.473,00. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian evaluasi kinerja PNS atau perubahan jumlah penerima tambahan penghasilan.
- Beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp49.399.946,00, sementara pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi. Beban ini muncul sebagai dampak dari pemberian tambahan penghasilan untuk PPPK berdasarkan prestasi kerja pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp61.200.000,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.1.3.1 Beban Honorarium

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Honorarium Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Honorarium yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Honorarium per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp50.400.000,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.1.3.2 Beban Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Pengelolaan BMD yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Pengelolaan BMD per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp10.800.000,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang	3.922.256.739,00	2.139.366.770,00	1.782.889.969,00	83,34
Beban Jasa	2.959.389.838,00	3.441.530.271,00	(482.140.433,00)	(14,01)
Beban Pemeliharaan	267.512.000,00	512.998.000,00	(245.486.000,00)	(47,85)
Beban Perjalanan Dinas	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
Jumlah	9.118.056.698,00	8.876.446.173,00	241.610.525,00	2,72

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp241.610.525,00 atau 2,72%.



5.3.1.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	3.912.498.729,00	2.139.366.770,00	1.773.131.959,00	82,88
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.758.010,00	0,00	9.758.010,00	0,00
Jumlah	3.922.256.739,00	2.139.366.770,00	1.782.889.969,00	83,34

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.782.889.969,00 atau 83,34%.

5.3.1.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang Pakai Habis yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	552.541.400,00	688.954.200,00	(136.412.800,00)	(19,80)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	13.146.000,00	(13.146.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.411.455,00	114.987.620,00	(41.576.165,00)	(36,16)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.012.016,00	28.647.000,00	11.365.016,00	39,67
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	130.568.344,00	5.652.000,00	124.916.344,00	2.210,13
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.350.000,00	9.260.000,00	90.000,00	0,97
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.679.000,00	51.162.000,00	(46.483.000,00)	(90,85)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.372.600,00	25.492.000,00	1.880.600,00	7,38
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.385.350,00	6.465.700,00	(1.080.350,00)	(16,71)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.288.015,00	0,00	46.288.015,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	177.912.320,00	242.944.500,00	(65.032.180,00)	(26,77)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.615.582.755,00	443.177.500,00	1.172.405.255,00	264,55
Beban Makanan dan Minuman Rapat	280.022.500,00	235.490.750,00	44.531.750,00	18,91
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	897.880.000,00	245.800.000,00	652.080.000,00	265,29
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.099.974,00	0,00	48.099.974,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	13.125.000,00	(13.125.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Olahraga	0,00	15.062.500,00	(15.062.500,00)	(100,00)
Jumlah	3.912.498.729,00	2.139.366.770,00	1.773.131.959,00	82,88

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.773.131.959,00 atau 82,88%.

5.3.1.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	9.758.010,00	0,00	9.758.010,00	0,00
Jumlah	9.758.010,00	0,00	9.758.010,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp9.758.010,00 atau 0,00%. Beban ini terkait dengan Bangunan Gedung Tempat Kerja – Taman, yang muncul pada tahun 2025 sebagai akibat pengadaan atau perawatan fasilitas taman di lingkungan gedung kerja.

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	2.261.499.838,00	3.102.440.909,00	(840.941.071,00)	(27,11)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	116.541.000,00	193.079.362,00	(76.538.362,00)	(39,64)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	494.849.000,00	109.360.000,00	385.489.000,00	352,50
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	86.500.000,00	36.650.000,00	49.850.000,00	136,02
Jumlah	2.959.389.838,00	3.441.530.271,00	(482.140.433,00)	(14,01)

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp482.140.433,00) atau (14,01%).

5.3.1.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Kantor yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	114.350.000,00	233.300.000,00	(118.950.000,00)	(50,99)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	281.250.000,00	227.250.000,00	54.000.000,00	23,76
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	44.850.000,00	(44.850.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	830.102.421,00	1.747.830.544,00	(917.728.123,00)	(52,51)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	33.000.000,00	14.000.000,00	42,42
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	147.834.928,00	139.056.256,00	8.778.672,00	6,31
Beban Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196,00	104.292.192,00	6.584.004,00	6,31
Beban Jasa Tenaga Supir	323.638.905,00	312.876.576,00	10.762.329,00	3,44
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	103.174.500,00	0,00	103.174.500,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	69.564.000,00	0,00	69.564.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	8.189.288,00	24.276.224,00	(16.086.936,00)	(66,27)
Beban Tagihan Air	2.050.350,00	4.710.450,00	(2.660.100,00)	(56,47)
Beban Tagihan Listrik	106.520.184,00	131.804.091,00	(25.283.907,00)	(19,18)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.902.500,00	6.869.000,00	(2.966.500,00)	(43,19)
Beban Paket/Pengiriman	28.241.266,00	29.832.376,00	(1.591.110,00)	(5,33)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.655.300,00	10.293.200,00	(637.900,00)	(6,20)
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00
Jumlah	2.261.499.838,00	3.102.440.909,00	(840.941.071,00)	(27,11)

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp840.941.071,00) atau (27,11%).

5.3.1.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.366.250,00	98.355.162,00	(38.988.912,00)	(39,64)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.236.400,00	5.361.882,00	(2.125.482,00)	(39,64)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.045.500,00	6.702.154,00	(2.656.654,00)	(39,64)
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	49.892.850,00	82.660.164,00	(32.767.314,00)	(39,64)
Jumlah	116.541.000,00	193.079.362,00	(76.538.362,00)	(39,64)

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp76.538.362,00) atau (39,64%).

5.3.1.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.128.000,00	33.000.000,00	(20.872.000,00)	(63,25)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	313.071.000,00	22.160.000,00	290.911.000,00	1.312,78
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	142.250.000,00	50.000.000,00	92.250.000,00	184,50
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	0,00
Jumlah	494.849.000,00	109.360.000,00	385.489.000,00	352,50

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp385.489.000,00 atau 352,50%.

5.3.1.1.2.2.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	18.800.000,00	(17.300.000,00)	(92,02)
Beban Sewa Taman	0,00	17.850.000,00	(17.850.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Hotel	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00
Jumlah	86.500.000,00	36.650.000,00	49.850.000,00	136,02

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp49.850.000,00 atau 136,02%.

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251.928.000,00	318.623.000,00	(66.695.000,00)	(20,93)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	191.525.000,00	(191.525.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.584.000,00	2.850.000,00	12.734.000,00	446,81
Jumlah	267.512.000,00	512.998.000,00	(245.486.000,00)	(47,85)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp245.486.000,00) atau (47,85%).

5.3.1.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	161.681.000,00	232.833.000,00	(71.152.000,00)	(30,56)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.072.000,00	0,00	11.072.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.180.000,00	18.190.000,00	(3.010.000,00)	(16,55)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	9.845.000,00	(9.845.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.030.000,00	26.120.000,00	16.910.000,00	64,74
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	22.035.000,00	(22.035.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.965.000,00	0,00	20.965.000,00	0,00
Jumlah	251.928.000,00	318.623.000,00	(66.695.000,00)	(20,93)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp66.695.000,00) atau (20,93%).

5.3.1.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	191.525.000,00	(191.525.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	191.525.000,00	(191.525.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp191.525.000,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.2.3.3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.880.000,00	2.850.000,00	30.000,00	1,05
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	7.838.000,00	0,00	7.838.000,00	0,00
Jumlah	15.584.000,00	2.850.000,00	12.734.000,00	446,81

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.734.000,00 atau 446,81%.

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)
Jumlah	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.226.653.011,00) atau (51,10%).

5.3.1.1.2.4.1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.092.998.121,00	2.246.261.132,00	(1.153.263.011,00)	(51,34)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.700.000,00	154.290.000,00	(124.590.000,00)	(80,75)
Jumlah	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.226.653.011,00) atau (51,10%).

5.3.1.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
Jumlah	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp413.000.000,00 atau 108,12%.

5.3.1.1.2.5.1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
Jumlah	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp413.000.000,00 atau 108,12%.

5.3.1.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban

Hibah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
Jumlah	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

5.3.1.1.3.1 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
Jumlah	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

5.3.1.1.3.1.1 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
Jumlah	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14

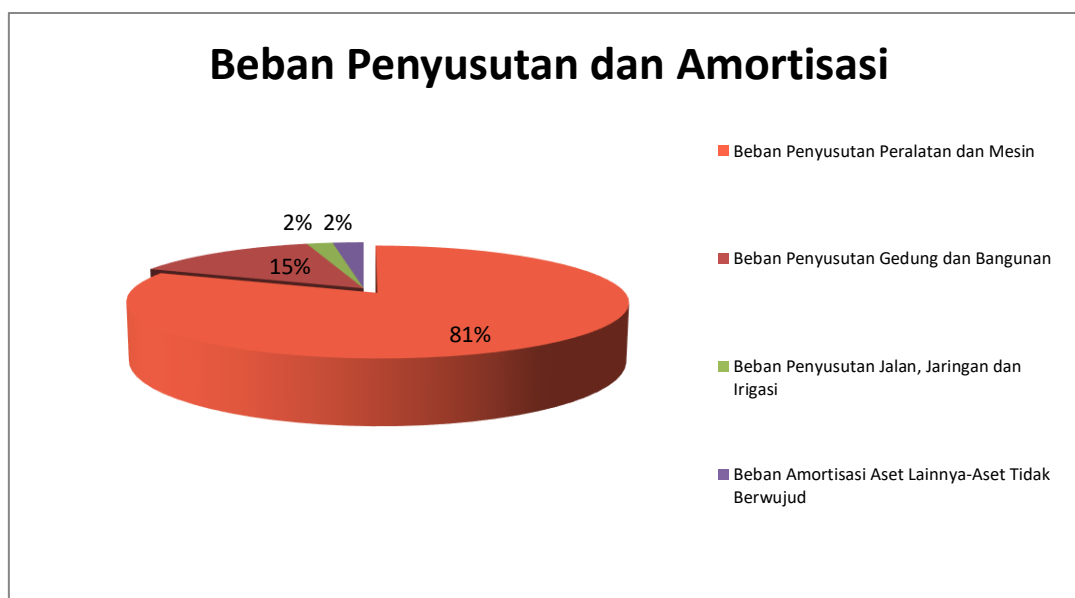
Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.939.600.000,00 atau 195,14%.

5.3.1.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165.216.953,00	158.561.007,00	6.655.946,00	4,20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.027.172,00	3.659.937,00	367.235,00	10,03
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)
Jumlah	203.410.913,00	206.392.581,00	(2.981.668,00)	(1,44)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.981.668,00) atau (1,44%).



5.3.1.1.4.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.042.749,00	79.159.922,00	(5.117.173,00)	(6,46)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.433.297,00	1.433.297,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Komputer	88.340.907,00	76.567.788,00	11.773.119,00	15,38
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	165.216.953,00	158.561.007,00	6.655.946,00	4,20

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.655.946,00 atau 4,20%.

5.3.1.1.4.1.1 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	690.000,00	5.936.700,00	(5.246.700,00)	(88,38)
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.992.500,00	9.900.000,00	(907.500,00)	(9,17)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	17.398.500,00	8.098.408,00	9.300.092,00	114,84
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	32.280,00	774.720,00	(742.440,00)	(95,83)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.096.999,00	23.097.000,00	999.999,00	4,33
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.021.368,00	19.867.900,00	(7.846.532,00)	(39,49)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.400.000,00	583.335,00	816.665,00	140,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	9.411.102,00	10.901.859,00	(1.490.757,00)	(13,67)
Jumlah	74.042.749,00	79.159.922,00	(5.117.173,00)	(6,46)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp5.117.173,00) atau (6,46%).

5.3.1.1.4.1.2 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.1.3 Beban Penyusutan Alat Laboratorium

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Laboratorium yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	1.433.297,00	1.433.297,00	0,00	0,00
Jumlah	1.433.297,00	1.433.297,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.1.4 Beban Penyusutan Komputer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Komputer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Komputer yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	19.661.180,00	5.232.430,00	14.428.750,00	275,76
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	54.358.913,00	56.714.502,00	(2.355.589,00)	(4,15)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	79.166,00	(79.166,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.540.314,00	5.761.190,00	(220.876,00)	(3,83)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.980.500,00	5.980.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah	88.340.907,00	76.567.788,00	11.773.119,00	15,38

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp11.773.119,00 atau 15,38%.

5.3.1.1.4.1.5 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77
Jumlah	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.118.309,00 atau 7,77%.

5.3.1.1.4.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Bangunan Gedung yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.835.280,00	15.835.280,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.768.064,00	2.757.755,00	3.010.309,00	109,16
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	680.640,00	680.640,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	5.556.204,00	5.556.204,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.030.600,00	1.030.600,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	500.000,00	1.392.000,00	(892.000,00)	(64,08)
Jumlah	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.118.309,00 atau 7,77%.

5.3.1.1.4.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui

oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi	2.678.370,00	2.678.370,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.348.802,00	981.567,00	367.235,00	37,41
Jumlah	4.027.172,00	3.659.937,00	367.235,00	10,03

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp367.235,00 atau 10,03%.

5.3.1.1.4.3.1 Beban Penyusutan Instalasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Instalasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Instalasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	2.678.370,00	2.678.370,00	0,00	0,00
Jumlah	2.678.370,00	2.678.370,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.4.3.2 Beban Penyusutan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jaringan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jaringan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	1.348.802,00	981.567,00	367.235,00	37,41
Jumlah	1.348.802,00	981.567,00	367.235,00	37,41

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp367.235,00 atau 37,41%.

5.3.1.1.4.4 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)

Tabel di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp12.123.158,00) atau (71,65%).

5.3.1.1.4.4.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)
Jumlah	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)

Tabel di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp12.123.158,00) atau (71,65%).

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas BPKAD Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	19.737.451.570,54	19.095.001.098,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(24.498.930.323,00)	(19.676.562.110,00)
RK PPKD	26.458.107.645,00	20.320.413.991,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	1.788.000,00	(1.401.408,46)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.788.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2025 tercatat sebesar Rp19.737.451.570,54. Saldo ini merupakan posisi ekuitas akhir pada tahun 2024 yang menjadi dasar perhitungan ekuitas tahun berjalan.

5.4.2 Surplus/(Defisit) - Laporan Operasional (LO)

Pada tahun 2025, entitas mencatat defisit Laporan Operasional sebesar Rp24.498.930.323,00.

Defisit ini menunjukkan bahwa beban operasional lebih besar dibanding

pendapatan operasional selama tahun berjalan.

5.4.3 Transaksi Antar Entitas (RK PPKD)

Rekening Koran PPKD (RK PPKD) tahun 2025 tercatat sebesar Rp26.458.107.645,00.

Pos ini berfungsi sebagai penyeimbang defisit operasional, sehingga turut menambah ekuitas pemerintah daerah.

5.4.4 Koreksi dan Lain-lain

Terdapat koreksi nilai sebesar Rp1.788.000,00 pada tahun 2025. Nilai ini berasal dari realokasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah. Koreksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang disajikan dalam akun utama Aset Tetap adalah aset yang benar-benar masih memiliki fungsi produktif bagi operasional pemerintah.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir entitas per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp21.698.416.892,54. Secara keseluruhan, Ekuitas entitas mengalami kenaikan neto sebesar Rp. 19.737.451.570,54. dari saldo awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun entitas memiliki beban operasional yang tinggi, komitmen pendanaan melalui mekanisme RK PPKD tetap mampu meningkatkan nilai kekayaan bersih entitas.

Meskipun pada tahun 2025 terjadi defisit operasional, ekuitas pemerintah daerah tetap mengalami peningkatan. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Kontribusi positif dari RK PPKD, dan
- Adanya koreksi aset tetap yang menambah nilai ekuitas.

Secara keseluruhan, kondisi ekuitas Dinas pada akhir tahun 2025 menunjukkan posisi keuangan yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited DPMD Dukcapil Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Catatan ini disusun untuk menyediakan informasi tambahan yang komprehensif atas pos-pos laporan keuangan, guna memberikan penjelasan yang memadai, meningkatkan pemahaman pengguna laporan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akutansi dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh pihak eksternal yang independen, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara, untuk memastikan keandalan dan kewajaran penyajian informasi keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan realisasi anggaran posisi keuangan, serta pengelolaan asset dan kewajiban DPMD DUKCAPIL selaku entitas pelaporan pada tahun anggran 2025. Laporan ini telah disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap atas kinerja keuangan dan pengelolaan asset daerah. Hasil audit eksternal telah menverifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta keakuratan pencatatan transaksi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam catatan ini.

DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akutanbel. Komitmen ini duwujudkan melalui penyempurnaan system akutansi, penguatan pengendalian internal, dan inplementasi rekomendasi hasil audit, guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Denpasar, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bali



I Made Dwi Dewata, S.STP, M.Si.

NIP.197504171996011001



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	26.263.941.863,00	24.272.768.258,00	92,42	20.250.233.991,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.544.283.540,00	10.651.346.987,00	92,27	9.170.455.188,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.772.784.424,00	5.477.031.693,00	94,88	3.716.752.267,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.688.775.391,00	3.617.660.831,00	98,07	2.668.200.552,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.536.945.522,00	2.484.576.899,00	97,94	2.640.402.552,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.151.829.869,00	1.133.083.932,00	98,37	27.798.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	356.980.185,00	349.130.574,00	97,80	261.215.558,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	246.002.038,00	240.958.482,00	97,95	259.225.310,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	110.978.147,00	108.172.092,00	97,47	1.990.248,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	188.612.499,00	184.131.429,00	97,62	164.110.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	170.660.000,00	166.178.930,00	97,37	160.240.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.952.499,00	17.952.499,00	100,00	3.870.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.340.000,00	117.425.000,00	99,23	73.745.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.130.000,00	58.215.000,00	98,45	73.745.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	59.210.000,00	59.210.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	198.267.855,00	194.411.490,00	98,05	133.325.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.372.900,00	124.345.140,00	98,40	132.021.660,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	71.894.955,00	70.066.350,00	97,46	1.303.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	706.028.627,00	578.908.598,00	82,00	40.615.874,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	667.816.637,00	574.524.854,00	86,03	40.615.874,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	38.211.990,00	4.383.744,00	11,47	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.811,00	53.417,00	78,77	34.730,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.992,00	32.056,00	69,70	34.235,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.819,00	21.361,00	97,90	495,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	333.800.873,00	274.134.989,00	82,13	231.322.776,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	272.509.305,00	216.951.046,00	79,61	229.976.448,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	61.291.568,00	57.183.943,00	93,30	1.346.328,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.060.411,00	7.761.412,00	85,66	5.473.115,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.911.904,00	5.084.510,00	86,00	5.406.398,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.148.507,00	2.676.902,00	85,02	66.717,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.181.143,00	23.283.953,00	85,66	16.419.442,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.735.733,00	15.253.592,00	86,00	16.219.297,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.445.410,00	8.030.361,00	85,02	200.145,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.499.629,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.786.383,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.713.246,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.771.499.116,00	5.174.315.294,00	89,65	5.392.502.921,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.551.498.918,00	3.180.770.864,00	89,56	3.367.689.632,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.435.025.656,00	3.075.957.982,00	89,55	3.367.689.632,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.473.262,00	104.812.882,00	89,99	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.656.226.627,00	1.486.772.480,00	89,77	1.484.338.413,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.606.821.221,00	1.442.313.168,00	89,76	1.484.338.413,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	49.405.406,00	44.459.312,00	89,99	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.807.394.723,00	9.112.035.261,00	92,91	8.880.141.803,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	552.585.000,00	552.541.400,00	99,99	688.050.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.146.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.662.600,00	75.953.200,00	81,09	114.480.290,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.744.600,00	43.944.016,00	74,81	30.064.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.750.000,00	131.587.344,00	82,37	5.728.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.742.300,00	9.390.000,00	63,69	9.420.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	894.900,00	165.000,00	18,44	54.600.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.180.000,00	27.372.600,00	90,70	25.492.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.992.400,00	5.311.350,00	88,63	6.539.700,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	54.973.100,00	46.288.015,00	84,20	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	188.648.050,00	177.912.320,00	94,31	242.944.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.758.600.000,00	1.615.582.755,00	91,87	443.177.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	304.650.000,00	280.022.500,00	91,92	235.490.750,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.510.000,00	3.393.000,00	96,67	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.855.000,00	897.880.000,00	99,67	245.800.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.100.000,00	48.099.974,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	15.062.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.147.225.773,00	2.960.181.666,00	94,06	3.441.472.431,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.401.668.733,00	2.262.291.666,00	94,20	3.102.383.069,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.500.000,00	114.350.000,00	88,99	233.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	307.500.000,00	281.250.000,00	91,46	227.250.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	830.102.421,00	830.102.421,00	100,00	1.747.830.544,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	147.834.928,00	147.834.928,00	100,00	139.056.256,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196,00	110.876.196,00	100,00	104.292.192,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	332.628.588,00	323.638.905,00	97,30	312.876.576,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	105.000.000,00	103.174.500,00	98,26	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	69.700.000,00	69.564.000,00	99,80	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.000.000,00	9.404.520,00	31,35	24.279.968,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	2.333.950,00	48,62	4.528.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	140.000.000,00	105.813.180,00	75,58	131.924.757,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.626.600,00	3.902.500,00	84,35	6.869.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	49.500.000,00	28.241.266,00	57,05	29.832.376,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.000.000,00	9.655.300,00	53,64	10.293.200,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.400.000,00	49.950.000,00	99,11	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	117.317.940,00	116.541.000,00	99,34	193.079.362,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.762.025,00	59.366.250,00	99,34	98.355.162,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.257.976,00	3.236.400,00	99,34	5.361.882,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.072.470,00	4.045.500,00	99,34	6.702.154,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	50.225.469,00	49.892.850,00	99,34	82.660.164,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	533.239.100,00	494.849.000,00	92,80	109.360.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.749.100,00	12.128.000,00	64,69	33.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	339.990.000,00	313.071.000,00	92,08	22.160.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	146.500.000,00	142.250.000,00	97,10	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	28.000.000,00	27.400.000,00	97,86	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	86.500.000,00	91,05	36.650.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	18.800.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	93.500.000,00	85.000.000,00	90,91	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	273.010.000,00	267.512.000,00	97,99	512.998.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257.010.000,00	251.928.000,00	98,02	318.623.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	162.000.000,00	161.681.000,00	99,80	232.833.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.200.000,00	11.072.000,00	98,86	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.470.000,00	15.180.000,00	92,17	18.190.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	9.845.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.260.000,00	43.030.000,00	95,07	26.120.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	22.035.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.080.000,00	20.965.000,00	94,95	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	191.525.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	191.525.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.000.000,00	15.584.000,00	97,40	2.850.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00	2.850.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	4.866.000,00	97,32	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.000.000,00	7.838.000,00	97,98	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.302.071.000,00	1.092.998.121,00	83,94	2.246.261.132,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.000.000,00	29.700.000,00	90,00	154.290.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.197.678.263,00	24.209.382.248,00	92,41	19.556.996.991,00
5.2	BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	478.836.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	196.948.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	161.993.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	91.093.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.954.500,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.954.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	56.263.600,00	53.628.000,00	95,32	257.888.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	87.258.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	18.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	69.258.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	199.516.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.885.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	95,66	693.237.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA	26.263.941.863,00	24.272.768.258,00	92,42	20.250.233.991,00
	SURPLUS/DEFISIT	(26.263.941.863,00)	(24.272.768.258,00)	92,42	(20.250.233.991,00)

Provinsi Bali, 27 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
KEPERDUDUKAN DAN
RENCATATAN SIPIL



I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP.197504171996011001



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	22.143.999.114,54	20.103.709.895,54
1.1	ASET LANCAR	11.284.055,00	8.339.310,00
1.1.12	Persediaan	11.284.055,00	8.339.310,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	11.284.055,00	8.339.310,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11.284.055,00	8.339.310,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.943.055,00	401.310,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	6.696.000,00	2.764.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.095.000,00	76.000,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	550.000,00	510.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	4.514.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	74.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	11.284.055,00	8.339.310,00
1.3	ASET TETAP	7.509.714.783,00	7.689.373.309,00
1.3.01	Tanah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00
1.3.01.01	Tanah	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.171.200.000,00	6.171.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.078.587.114,00	5.392.028.714,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.411.529.400,00	2.411.529.400,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.370.178.600,00	2.370.178.600,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.350.800,00	41.350.800,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.296.145.200,00	1.471.225.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	195.352.500,00	279.171.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	100.392.500,00	142.192.500,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	94.960.000,00	136.978.500,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	958.645.600,00	1.049.906.900,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	423.318.800,00	449.966.300,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	14.759.300,00	16.696.100,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	191.589.500,00	254.266.500,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.250.000,00	1.250.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	320.728.000,00	320.728.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	142.147.100,00	142.147.100,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	36.259.600,00	36.259.600,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	10.800.000,00	10.800.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	95.087.500,00	95.087.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	124.042.600,00	124.042.600,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	24.222.000,00	24.222.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	12.722.000,00	12.722.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	11.500.000,00	11.500.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	99.820.600,00	99.820.600,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	99.820.600,00	99.820.600,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	21.499.450,00	21.499.450,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	21.499.450,00	21.499.450,00
1.3.02.08.08.0006	Peralatan Umum	21.499.450,00	21.499.450,00
1.3.02.10	Komputer	1.219.370.464,00	1.357.732.264,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	823.190.944,00	923.139.244,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	103.447.845,00	103.447.845,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	719.743.099,00	819.691.399,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	396.179.520,00	434.593.020,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	3.800.000,00	3.800.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	25.635.000,00	25.635.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	132.906.500,00	151.756.500,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	222.638.020,00	242.201.520,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.411.721.518,00	1.456.321.518,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.335.191.518,00	1.335.191.518,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	744.044.093,00	744.044.093,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	262.146.000,00	262.146.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	34.032.000,00	34.032.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	294.969.425,00	294.969.425,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	76.530.000,00	121.130.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	51.530.000,00	51.530.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	25.000.000,00	69.600.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.978.800,00	137.978.800,00
1.3.04.03	Instalasi	107.134.800,00	107.134.800,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	107.134.800,00	107.134.800,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	107.134.800,00	107.134.800,00
1.3.04.04	Jaringan	30.844.000,00	30.844.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	30.844.000,00	30.844.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	30.844.000,00	30.844.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	26.300.000,00	26.300.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.300.000,00	26.300.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	26.300.000,00	26.300.000,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	26.300.000,00	26.300.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.316.072.649,00)	(5.494.455.723,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.646.797.889,00)	(4.848.618.256,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.411.529.400,00)	(2.411.529.400,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.370.178.600,00)	(2.370.178.600,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(41.350.800,00)	(41.350.800,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.120.409.982,00)	(1.221.414.753,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(100.392.500,00)	(141.502.500,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(93.475.000,00)	(126.501.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(356.624.538,00)	(365.873.538,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(14.759.300,00)	(16.631.540,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(154.242.750,00)	(192.822.751,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(285.478.000,00)	(273.456.632,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.983.335,00)	(583.335,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(36.259.600,00)	(36.259.600,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(10.800.000,00)	(10.800.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(65.144.959,00)	(55.733.857,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(123.609.267,00)	(123.409.267,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(12.288.667,00)	(12.088.667,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(11.500.000,00)	(11.500.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(99.820.600,00)	(99.820.600,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(20.998.594,00)	(19.565.297,00)
1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	(20.998.594,00)	(19.565.297,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(966.750.646,00)	(1.070.399.539,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(51.847.859,00)	(32.186.679,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(555.735.473,00)	(639.952.860,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(3.800.000,00)	(3.800.000,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(25.635.000,00)	(25.635.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(105.406.500,00)	(133.716.186,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(216.159.147,00)	(229.742.147,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(8.166.667,00)	(5.366.667,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(3.500.000,00)	(2.300.000,00)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(3.500.000,00)	(2.300.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(586.628.477,00)	(567.218.356,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(432.960.830,00)	(417.125.550,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(54.976.402,00)	(49.208.338,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(9.869.280,00)	(9.188.640,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(60.766.015,00)	(55.209.811,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(14.514.283,00)	(13.483.683,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(13.541.667,00)	(23.002.334,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(56.346.283,00)	(52.319.111,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(43.077.118,00)	(40.398.748,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(43.077.118,00)	(40.398.748,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13.269.165,00)	(11.920.363,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(13.269.165,00)	(11.920.363,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(26.300.000,00)	(26.300.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.509.714.783,00	7.689.373.309,00
1.5	ASET LAINNYA	14.623.000.276,54	12.405.997.276,54
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	144.896.700,00	144.896.700,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	144.896.700,00	144.896.700,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	144.896.700,00	144.896.700,00
1.5.03.01.01.0005	Software	120.916.700,00	120.916.700,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.980.000,00	23.980.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54
1.5.04.01	Aset Lain-lain	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	14.619.003.609,54	12.397.204.609,54
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(140.900.033,00)	(136.104.033,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	14.623.000.276,54	12.405.997.276,54
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	22.143.999.114,54	20.103.709.895,54
2	KEWAJIBAN	445.582.222,00	366.258.325,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	445.582.222,00	366.258.325,00
2.1.06	Utang Belanja	445.582.222,00	366.258.325,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	433.967.527,00	353.851.802,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.205.415,00	9.684.638,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.529.849,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.012.038,00	9.684.638,00
2.1.06.01.01.0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	663.528,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	386.762.112,00	344.167.164,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	216.778.876,00	5.366.513,00
2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.647.550,00	0,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	44.785.708,00	246.375.277,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	108.609.344,00	92.425.374,00
2.1.06.01.02.0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.940.634,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.614.695,00	12.406.523,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	11.614.695,00	12.406.523,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	799.091,00	2.014.323,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	150.450,00	434.050,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.665.154,00	9.958.150,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	445.582.222,00	366.258.325,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	445.582.222,00	366.258.325,00
3	EKUITAS	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54
3.1	EKUITAS	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54
3.1.01	Ekuitas	(4.759.723.032,46)	(582.962.420,46)
3.1.01.01	Ekuitas	19.739.239.570,54	19.093.599.689,54
3.1.01.01.01	Ekuitas	19.739.239.570,54	19.093.599.689,54
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	19.739.239.570,54	19.093.599.689,54
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(24.498.962.603,00)	(19.676.562.110,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00
3.1.03.01	RK PPKD	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	26.458.139.925,00	20.320.413.991,00
	JUMLAH EKUITAS	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.143.999.114,54	20.103.709.895,54

Provinsi Bali, 27 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP. 197504171996011001



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	24.498.930.323,00	19.676.562.110,00	4.822.368.213,00	24,51
8.1	BEBAN OPERASI	24.295.519.410,00	19.470.169.529,00	4.825.349.881,00	24,78
8.1.01	Beban Pegawai	10.731.462.712,00	9.087.323.356,00	1.644.139.356,00	18,09
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.514.552.470,00	3.715.475.655,00	1.799.076.815,00	48,42
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.617.660.831,00	2.668.200.552,00	949.460.279,00	35,58
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.484.576.899,00	2.640.402.552,00	(155.825.653,00)	(5,90)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	1.133.083.932,00	27.798.000,00	1.105.285.932,00	3.976,13
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	349.130.574,00	261.215.558,00	87.915.016,00	33,66
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	240.958.482,00	259.225.310,00	(18.266.828,00)	(7,05)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	108.172.092,00	1.990.248,00	106.181.844,00	5.335,11
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.130.000,00	122.290.000,00	7.840.000,00	6,41
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	130.130.000,00	122.290.000,00	7.840.000,00	6,41
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	184.131.429,00	164.110.000,00	20.021.429,00	12,20
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	166.178.930,00	160.240.000,00	5.938.930,00	3,71
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17.952.499,00	3.870.000,00	14.082.499,00	363,89
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.425.000,00	73.745.000,00	43.680.000,00	59,23
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.215.000,00	73.745.000,00	(15.530.000,00)	(21,06)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	59.210.000,00	0,00	59.210.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	194.411.490,00	133.325.220,00	61.086.270,00	45,82
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	124.345.140,00	132.021.660,00	(7.676.520,00)	(5,81)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	70.066.350,00	1.303.560,00	68.762.790,00	5.275,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	616.438.447,00	40.615.874,00	575.822.573,00	1.417,73
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	612.054.703,00	40.615.874,00	571.438.829,00	1.406,93
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.383.744,00	0,00	4.383.744,00	100,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	53.417,00	34.730,00	18.687,00	53,81
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.056,00	34.235,00	(2.179,00)	(6,36)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	21.361,00	495,00	20.866,00	4.215,35
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	274.125.917,00	230.046.164,00	44.079.753,00	19,16
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216.278.446,00	228.699.836,00	(12.421.390,00)	(5,43)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	57.847.471,00	1.346.328,00	56.501.143,00	4.196,68
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.761.412,00	5.473.115,00	2.288.297,00	41,81
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.084.510,00	5.406.398,00	(321.888,00)	(5,95)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.676.902,00	66.717,00	2.610.185,00	3.912,32
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	23.283.953,00	16.419.442,00	6.864.511,00	41,81
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.253.592,00	16.219.297,00	(965.705,00)	(5,95)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.030.361,00	200.145,00	7.830.216,00	3.912,27
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.216.910.242,00	5.310.647.701,00	(93.737.459,00)	(1,77)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.403.830.777,00	3.327.712.039,00	76.118.738,00	2,29
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.287.370.345,00	3.327.712.039,00	(40.341.694,00)	(1,21)
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.460.432,00	0,00	116.460.432,00	100,00
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	305.182.381,00	524.043.189,00	(218.860.808,00)	(41,76)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	305.182.381,00	524.043.189,00	(218.860.808,00)	(41,76)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.507.897.084,00	1.458.892.473,00	49.004.611,00	3,36
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.458.497.138,00	1.458.892.473,00	(395.335,00)	(0,03)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	49.399.946,00	0,00	49.399.946,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.118.056.698,00	8.876.446.173,00	241.610.525,00	2,72
8.1.02.01	Beban Barang	3.922.256.739,00	2.139.366.770,00	1.782.889.969,00	83,34
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.912.498.729,00	2.139.366.770,00	1.773.131.959,00	82,88
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	552.541.400,00	688.954.200,00	(136.412.800,00)	(19,80)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	13.146.000,00	(13.146.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.411.455,00	114.987.620,00	(41.576.165,00)	(36,16)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.012.016,00	28.647.000,00	11.365.016,00	39,67
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	130.568.344,00	5.652.000,00	124.916.344,00	2.210,13
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.350.000,00	9.260.000,00	90.000,00	0,97
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.679.000,00	51.162.000,00	(46.483.000,00)	(90,85)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.372.600,00	25.492.000,00	1.880.600,00	7,38
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.385.350,00	6.465.700,00	(1.080.350,00)	(16,71)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.288.015,00	0,00	46.288.015,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	177.912.320,00	242.944.500,00	(65.032.180,00)	(26,77)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.615.582.755,00	443.177.500,00	1.172.405.255,00	264,55
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	280.022.500,00	235.490.750,00	44.531.750,00	18,91
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	897.880.000,00	245.800.000,00	652.080.000,00	265,29
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.099.974,00	0,00	48.099.974,00	100,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	13.125.000,00	(13.125.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	0,00	15.062.500,00	(15.062.500,00)	(100,00)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.758.010,00	0,00	9.758.010,00	100,00
8.1.02.01.04.0545	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	9.758.010,00	0,00	9.758.010,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.959.389.838,00	3.441.530.271,00	(482.140.433,00)	(14,01)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.261.499.838,00	3.102.440.909,00	(840.941.071,00)	(27,11)
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	114.350.000,00	233.300.000,00	(118.950.000,00)	(50,99)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	281.250.000,00	227.250.000,00	54.000.000,00	23,76
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	44.850.000,00	(44.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	830.102.421,00	1.747.830.544,00	(917.728.123,00)	(52,51)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.000.000,00	33.000.000,00	14.000.000,00	42,42
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	147.834.928,00	139.056.256,00	8.778.672,00	6,31
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196,00	104.292.192,00	6.584.004,00	6,31
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	323.638.905,00	312.876.576,00	10.762.329,00	3,44
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	103.174.500,00	0,00	103.174.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	69.564.000,00	0,00	69.564.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	8.189.288,00	24.276.224,00	(16.086.936,00)	(66,27)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	2.050.350,00	4.710.450,00	(2.660.100,00)	(56,47)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	106.520.184,00	131.804.091,00	(25.283.907,00)	(19,18)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.902.500,00	6.869.000,00	(2.966.500,00)	(43,19)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	28.241.266,00	29.832.376,00	(1.591.110,00)	(5,33)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.655.300,00	10.293.200,00	(637.900,00)	(6,20)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	116.541.000,00	193.079.362,00	(76.538.362,00)	(39,64)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.366.250,00	98.355.162,00	(38.988.912,00)	(39,64)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.236.400,00	5.361.882,00	(2.125.482,00)	(39,64)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.045.500,00	6.702.154,00	(2.656.654,00)	(39,64)
8.1.02.02.02.0010	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	49.892.850,00	82.660.164,00	(32.767.314,00)	(39,64)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	494.849.000,00	109.360.000,00	385.489.000,00	352,50
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.128.000,00	33.000.000,00	(20.872.000,00)	(63,25)
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	313.071.000,00	22.160.000,00	290.911.000,00	1.312,78
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	142.250.000,00	50.000.000,00	92.250.000,00	184,50
8.1.02.02.04.0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	86.500.000,00	36.650.000,00	49.850.000,00	136,02
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	18.800.000,00	(17.300.000,00)	(92,02)
8.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman	0,00	17.850.000,00	(17.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	267.512.000,00	512.998.000,00	(245.486.000,00)	(47,85)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251.928.000,00	318.623.000,00	(66.695.000,00)	(20,93)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	161.681.000,00	232.833.000,00	(71.152.000,00)	(30,56)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.072.000,00	0,00	11.072.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.180.000,00	18.190.000,00	(3.010.000,00)	(16,55)
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	9.845.000,00	(9.845.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.030.000,00	26.120.000,00	16.910.000,00	64,74
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	22.035.000,00	(22.035.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.965.000,00	0,00	20.965.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	191.525.000,00	(191.525.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	191.525.000,00	(191.525.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.584.000,00	2.850.000,00	12.734.000,00	446,81
8.1.02.03.04.0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.880.000,00	2.850.000,00	30.000,00	1,05
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	7.838.000,00	0,00	7.838.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.173.898.121,00	2.400.551.132,00	(1.226.653.011,00)	(51,10)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.092.998.121,00	2.246.261.132,00	(1.153.263.011,00)	(51,34)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.700.000,00	154.290.000,00	(124.590.000,00)	(80,75)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	795.000.000,00	382.000.000,00	413.000.000,00	108,12
8.1.05	Beban Hibah	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.446.000.000,00	1.506.400.000,00	2.939.600.000,00	195,14
	JUMLAH BEBAN OPERASI	24.295.519.410,00	19.470.169.529,00	4.825.349.881,00	24,78
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	203.410.913,00	206.392.581,00	(2.981.668,00)	(1,44)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165.216.953,00	158.561.007,00	6.655.946,00	4,20
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.042.749,00	79.159.922,00	(5.117.173,00)	(6,46)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	690.000,00	5.936.700,00	(5.246.700,00)	(88,38)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.992.500,00	9.900.000,00	(907.500,00)	(9,17)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	17.398.500,00	8.098.408,00	9.300.092,00	114,84
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	32.280,00	774.720,00	(742.440,00)	(95,83)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.096.999,00	23.097.000,00	999.999,00	4,33
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.021.368,00	19.867.900,00	(7.846.532,00)	(39,49)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.400.000,00	583.335,00	816.665,00	140,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	9.411.102,00	10.901.859,00	(1.490.757,00)	(13,67)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.433.297,00	1.433.297,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	1.433.297,00	1.433.297,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	88.340.907,00	76.567.788,00	11.773.119,00	15,38
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	19.661.180,00	5.232.430,00	14.428.750,00	275,76
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	54.358.913,00	56.714.502,00	(2.355.589,00)	(4,15)
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	79.166,00	(79.166,00)	(100,00)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.540.314,00	5.761.190,00	(220.876,00)	(3,83)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.980.500,00	5.980.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	29.370.788,00	27.252.479,00	2.118.309,00	7,77
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.835.280,00	15.835.280,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.768.064,00	2.757.755,00	3.010.309,00	109,16
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	680.640,00	680.640,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	5.556.204,00	5.556.204,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.030.600,00	1.030.600,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	500.000,00	1.392.000,00	(892.000,00)	(64,08)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.027.172,00	3.659.937,00	367.235,00	10,03
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	2.678.370,00	2.678.370,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	2.678.370,00	2.678.370,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	1.348.802,00	981.567,00	367.235,00	37,41
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	1.348.802,00	981.567,00	367.235,00	37,41
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	4.796.000,00	16.919.158,00	(12.123.158,00)	(71,65)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	203.410.913,00	206.392.581,00	(2.981.668,00)	(1,44)
	JUMLAH BEBAN	24.498.930.323,00	19.676.562.110,00	4.822.368.213,00	24,51

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.498.930.323,00)	(19.676.562.110,00)	(4.822.368.213,00)	24,51

Provinsi Bali, 10 Februari 2026
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL**



Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP. 197504171996011001



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	19.737.451.570,54	19.095.001.098,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(24.498.930.323,00)	(19.676.562.110,00)
RK PPKD	26.458.107.645,00	20.320.413.991,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	1.788.000,00	(1.401.408,46)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.788.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	21.698.416.892,54	19.737.451.570,54

Provinsi Bali, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL



I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP.197504171996011001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAMPIRAN RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2025

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DUKCAPIL PROVINSI BALI

BULAN		SP2D			SPJ	CONTRA POST (CP)			REALISASI	SISA
		GAJI	LS	UP/GU/TU		GAJI	LS	UP/GU/TU		
1		2	3	4	5	6	7	8	9 = (2+3+5)-(6+7+8)	10 = 4-(5+8)
1	Januari	601.687.699,00	0,00	0,00	120.000.000,00	37.195.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pebruari	636.197.940,00	431.979.624,00	0,00	37.195.549,00	113.172.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Maret	915.238.520,00	302.477.224,00	0,00	113.172.423,00	106.838.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	April	989.295.506,00	336.057.624,00	0,00	106.838.959,00	119.589.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mei	644.362.074,00	809.649.604,00	0,00	230.597.338,00	184.364.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Juni	1.442.935.657,00	792.774.988,00	0,00	73.356.812,00	119.611.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Juli	835.037.604,00	1.320.059.279,00	0,00	237.766.040,00	237.099.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Agustus	824.807.704,00	882.963.834,00	0,00	118.945.659,00	112.944.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	September	810.843.781,00	164.897.759,00	0,00	112.944.932,00	118.813.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oktober	1.310.820.957,00	753.271.043,00	0,00	236.716.105,00	237.604.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	November	847.440.930,00	3.647.978.336,00	0,00	227.854.881,00	188.699.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Desember	826.428.615,00	2.449.965.649,00	0,00	80.546.276,00	119.661.333,00	0,00	0,00	0,00	338.667,00
		10.685.096.987,00	11.892.074.964,00	0,00	1.695.934.974,00	1.695.596.307,00	0,00	0,00	0,00	

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali



I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP. 197504171996011001

DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

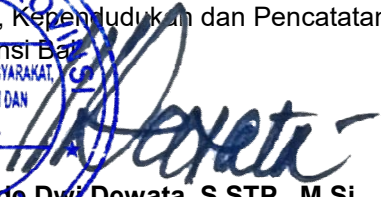
DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG

TAHUN 20205

KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	8,339,310.00	8,339,310.00	0
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	8,339,310.00	8,339,310.00	0
1.1.12.01.01	Bahan	0	0	0
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			0
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			0
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			0
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			0
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			0
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			0
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			0
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			0
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			0
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			0
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			0
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0	0	0
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			0
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			0
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			0
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			0
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			0
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			0
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			0
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			0
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			0
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			0
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	8,339,310.00	8,339,310.00	0
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	401,310.00	401,310.00	0
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	2,764,000.00	2,764,000.00	0
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	76,000.00	76,000.00	0
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	510,000.00	510,000.00	0

1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	4,514,000.00	4,514,000.00	0
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			0
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	74,000.00	74,000.00	0
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			0
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			0
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0	0	0
1.1.12.01.04.0001	Obat			0
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			0
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0	0	0
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			0
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0	0
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0	0	0
1.1.12.01.07.0001	Natura			0
1.1.12.01.07.0002	Pakan			0
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			0
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0	0	0
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			0
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			0
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			0
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0	0	0
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			0
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0
1.1.12.02.01	Komponen	0	0	0
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			0
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			0
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			0
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			0
1.1.12.02.01.0005	Attachment			0
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			0
1.1.12.02.02	Pipa	0	0	0
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			0
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			0
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			0

1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			0
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			0
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			0
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			0
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0	0	0
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			0
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			0
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0


 Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Bali

I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
 NIP. 197504171996011001

DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG

PERIODE TAHUN 2020/5

KODE REKENING	URAIAN	Data Pejabat Penatausahaan Keuangan				Data Pejabat Penatausahaan Barang			
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.12	Persediaan	2,686,048,000.00	0	0	0	2,686,048,000.00	0	0	0
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2,686,048,000.00	0	0	0	2,686,048,000.00	0	0	0
1.1.12.01.01	Bahan	552,541,400.00	0	0	0	552,541,400.00	0	0	0
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan								
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia								
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan	552,541,400.00				552,541,400.00			
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku								
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir								
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses								
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman								
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam								
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas								
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit								
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya								
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar								
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat								
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja								
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya								
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk	517,923,845.00	0	0	0	517,923,845.00	0	0	0
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	75,953,200.00				75,953,200.00			
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	43,944,016.00				43,944,016.00			
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	131,587,344.00				131,587,344.00			
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	9,390,000.00				9,390,000.00			
1.1.12.01.03.0005	Persediaan								
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	165,000.00				165,000.00			
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	27,372,600.00				27,372,600.00			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	5,311,350.00				5,311,350.00			
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	46,288,015.00				46,288,015.00			
1.1.12.01.03.0010	Kaporpap dan								
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan								
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata								
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk	177,912,320.00				177,912,320.00			
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.04.0001	Obat								
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya								
1.1.12.01.05	Persediaan untuk	1,615,582,755.00	0	0	0	1,615,582,755.00	0	0	0
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk	1,615,582,755.00				1,615,582,755.00			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk								
1.1.12.01.06	Persediaan untuk	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk								
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk								
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.07.0001	Natura								
1.1.12.01.07.0002	Pakan								
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan								
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian								
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian								
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian								
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian								
1.1.12.01.09	Persediaan dalam	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam								
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam								
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.01	Komponen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan								
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan								
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan								
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-								
1.1.12.02.01.0005	Attachment								
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya								
1.1.12.02.02	Pipa	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang								
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)								
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja								

1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan									
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass									
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)									
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya									
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas									
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas									
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan									

Dipaparkan, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kehendudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEPERAWATAN
DESA, KEHENDUKUN DAN PENCATATAN SIPIL
I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
NIP. 197504171996011001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR MUTASI KURANG PERSEDIAAN BARANG
TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	Data PP. Keuangan						Data PP. Barang					
		Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Koreksi Catat Tahun Berjalan	Mutasi OPD	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Koreksi Catat Tahun Berjalan	Mutasi OPD
1.1.12	1.1.12.01	2.483.103.255,00	0	0	0	0	0	2.483.103.255,00	0	0	0	0	0
	Barang Paket Maki	2.483.103.255,00	0	0	0	0	0	2.483.103.255,00	0	0	0	0	0
1.1.12.01.01	Bahan	552.541.400,00	0	0	0	0	0	552.541.400,00	0	0	0	0	0
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi												
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia												
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Polumas	552.541.400,00						552.541.400,00					
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu												
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kertas/Kulit												
1.1.12.01.01.0007	Barang Garam Proses												
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman												
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran												
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas												
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Obat Ikan												
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lain-lain												
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan												
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Beker												
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran												
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium												
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar												
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Listrik dan Komunikasi												
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian												
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Rangkaian												
1.1.12.01.02.0009	Perediaan alat Benda Rangkaian Sosial												
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lain-lain	514.979.100,00	0	0	0	0	0	514.979.100,00	0	0	0	0	0
1.1.12.01.03	Alat Tulis Kantor	73.411.453,00						73.411.453,00					
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	73.411.453,00						73.411.453,00					
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Lembar	30.012.018,00						30.012.018,00					
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	150.588.344,00						150.588.344,00					
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	9.350.000,00						9.350.000,00					
1.1.12.01.03.0005	Perediaan Dokumen/Administrasi Tender												
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	4.679.000,00						4.679.000,00					
1.1.12.01.03.0007	Peralat Kantor	27.122.660,00						27.122.660,00					
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	5.385.350,00						5.385.350,00					
1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dapur	46.288.015,00						46.288.015,00					
1.1.12.01.03.0010	Kapung dan Perengkapan Satwa												
1.1.12.01.03.0011	Perengkapan Perkebunan/Chetrago												
1.1.12.01.03.0012	Kontainer/Container Metal	177.912.320,00						177.912.320,00					
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain-lain												
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.04.0001	Obat												
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lain-lain												
1.1.12.01.05	Perediaan untuk Disusi/Diseminasi	1.615.582.755,00	0	0	0	0	0	1.615.582.755,00	0	0	0	0	0
1.1.12.01.05.0001	Perediaan untuk Disusi/Diseminasi kepada Masyarakat	1.615.582.755,00	0	0	0	0	0	1.615.582.755,00	0	0	0	0	0
1.1.12.01.05.0002	Perediaan untuk Disusi/Diseminasi Lain-lain												
1.1.12.01.06	Perediaan untuk Tujuan Strategis/Berjang Jaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.06.0001	Perediaan untuk Tujuan Strategis/Berjang Jaga												
1.1.12.01.06.0002	Perediaan untuk Tujuan Strategis/Berjang Jaga Lain-lain												
1.1.12.01.07	Natura dan Pakaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.07.0001	Natura												
1.1.12.01.07.0002	Natura dan Pakaian Lain-lain												
1.1.12.01.08	Perediaan Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.08.0001	Perediaan Penelitian Biologi												
1.1.12.01.08.0002	Perediaan Penelitian Biologi Lain-lain												
1.1.12.01.08.0003	Perediaan Penelitian Teknologi												
1.1.12.01.08.0004	Perediaan Penelitian Lain-lain												
1.1.12.01.09	Perediaan dalam Proses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.01.09.0001	Perediaan dalam Proses												
1.1.12.01.09.0002	Perediaan dalam Proses Lain-lain												
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.01	Komponen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jambatan Baga												
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jambatan Perikanan												
1.1.12.02.01.0003	Komponen Perlatan												
1.1.12.02.01.0004	Komponen Tambak/Rambak												
1.1.12.02.01.0005	Attachment												
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lain-lain												
1.1.12.02.02	Pipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersi Turgan (DCL)												
1.1.12.02.02.0002	Pipa Apak Semam (APC)												
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baga												
1.1.12.02.02.0004	Pipa Baga Perikanan												
1.1.12.02.02.0005	Pipa Baga Gas												
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)												
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lain-lain												
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas												
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas												
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lain-lain												

31 Desember 2025
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Bali
 I Made Gwi Gwata, S.STP., M.Si.
 NIP. 1964171996011001

DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG

PERIODE TAHUN 20205

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	BA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	11,284,055.00	11,284,055.00	0
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	11,284,055.00	11,284,055.00	0
1.1.12.01.01	Bahan	0	0	0
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0	0
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0	0	0
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	0
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0	0	0
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0	0	0
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0	0	0
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0	0	0
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0	0
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0	0	0
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0	0
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0	0	0
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0	0	0
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0	0	0
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0	0
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0	0
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0	0
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	0	0
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0	0
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0	0
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11,284,055.00	11,284,055.00	0
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2,943,055.00	2,943,055.00	0
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	6,696,000.00	6,696,000.00	0
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1,095,000.00	1,095,000.00	0
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	550,000.00	550,000.00	0

1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0	0
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0	0	0
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0	0	0
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0	0	0
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0	0	0
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0	0	0
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0	0
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0	0	0
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0	0	0
1.1.12.01.04.0001	Obat	0	0	0
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0	0	0
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0	0
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0	0
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0	0	0
1.1.12.01.07.0001	Natura	0	0	0
1.1.12.01.07.0002	Pakan	0	0	0
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0	0	0
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0	0	0
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0	0
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0	0	0
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0	0	0
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0	0	0
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	0	0
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0
1.1.12.02.01	Komponen	0	0	0
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0	0	0
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0	0	0
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0	0	0
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0	0	0
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0	0	0
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0	0	0
1.1.12.02.02	Pipa	0	0	0
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0	0	0
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0	0	0
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0	0	0

1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0	0	0
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0	0	0
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0	0	0
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0	0	0
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0	0	0
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0	0	0
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0	0	0
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0	0	0

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali



I Made Dwi Dewata, S.S.P., M.Si.

NIP. 197504171996011001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DUKCAPIL PROVINSI BALI
LAMPIRAN UTANG
TAHUN 2025

Kode>Nama Akun	UNIT OPD	Nama Pihak ke-3/Penyedia Barang Jasa	Tanggal Penetapan Utang	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Jumlah Setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Mutasi Selama 2025 (Rp)		Saldo Akhir 2025
					Bertambah	Berkurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31 Desember 2024	353.851.802,00	-	-	353.851.802,00	-	353.851.802,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	433.967.527,00	-	433.967.527,00
2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai Total				353.851.802,00	-	-	353.851.802,00	433.967.527,00	353.851.802,00	433.967.527,00
2.1.06.02-Utang Belanja Barang dan Jasa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perumda Air Minum Sewakadarma	31 Desember 2024	434.050,00	-	-	434.050,00	-	434.050,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	150.450,00	-	150.450,00
		PT Telkom	31 Desember 2024	2.014.323,00	-	-	2.014.323,00	-	2.014.323,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	799.091,00	-	799.091,00
		PT. PLN	31 Desember 2024	9.958.150,00	-	-	9.958.150,00	-	9.958.150,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	10.662.654,00	-	10.662.654,00
2.1.06.02-Utang Belanja Barang dan Jasa Total				12.406.523,00	-	-	12.406.523,00	11.612.195,00	12.406.523,00	11.612.195,00
Grand Total				366.258.325,00	-	-	366.258.325,00	445.579.722,00	366.258.325,00	445.579.722,00

